

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Maret | Tahun 2025 No. 56

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif | Atraktif | Substantif



*Kebijakan
Efisiensi Anggaran*

***Mesti Dukung
Sektor
Produktif***

H. Hendry Munief, M.B.A

Tujuan bernegara kalau mau kita sederhanakan adalah "melayani rakyat". Dimensi pelayanan publik (public services) ini penting karena merupakan alasan utama (*raison d'être*) lahirnya negara sebagai sebuah kontrak sosial antara penyelenggara negara dengan rakyat untuk mengatur dan mengurus hajat hidup mereka.

Tema pelayanan rakyat ini pula yang seharusnya menjadi fokus kerja politik dari partai politik manapun. Kita ingin terus mendorong dan menghadirkan negara yang benar-benar melayani rakyat. Apalagi kita sepakat membangun sistem demokrasi yang lebih substantif untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi substantif adalah demokrasi yang bekerja untuk memenuhi keinginan dan aspirasi rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Jadi, tugas utama negara yang dipersonifikasi oleh para pemimpin dan pejabat publik adalah melayani rakyat, bukan melayani elit, kelompok, dan partai pendukungnya.

Dalam konsep pemerintahan ada dua kategori tata kelola pemerintahan: good governance dan bad governance. Ada sembilan prinsip good governance, yaitu partisipasi, ketepatan hukum (rule of law), transparansi, responsif, berorientasi solusi/konsensus, kesetaraan (equity), efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Negara dan pemerintahan yang



tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan sendirinya masuk dalam kategori bad governance.

Kita harus jujur mengakui bahwa negara kita belum benar-benar menerapkan good gover-

nance, sehingga perlu didorong terus upaya reformasi tata kelola negara dan pemerintahan. Praktek buruk yang masih kerap terjadi dalam pemerintahan berupa korupsi, politisasi birokrasi, maladministrasi, dan lain-lain.

Untuk itu setidaknya ada empat sasaran perbaikan dan penguatan. Pertama, kita harus serius membangun budaya melayani, bukan dilayani. Ubah paradigma pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat. Isti-

lah pejabat publik semestinya juga harus direvisi dengan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Islam, khalifah sering disebut sebagai qodimul ummah.

Kedua, kita harus serius membangun dan mengembangkan sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen dan tata kelola SDM pemerintahan.

Ketiga, tidak ada pelayanan yang baik tanpa pertanggung jawaban publik. Maka kita harus serius membangun dan mengembangkan sistem akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintahan meliputi kinerja pelayanan, keuangan, dan administrasi. Rumusnya sederhana: kewenangan tanpa akuntabilitas akan menghasilkan korupsi.

Keempat, untuk mengakkan prinsip akuntabilitas maka diperlukan satu sistem pengawasan yang kuat dan melekat, yang mencegah perilaku maladministrasi dan korupsi. Inilah penyakit birokrasi kita yang harus kita berantas tuntas. Stop korupsi dan maladministrasi

Kelima, penguatan sistem regulasi (perundang-undangan) yg komprehensif dan sinergis dari pusat hingga daerah yang mementingkan dimensi pelayanan publik. Undang-undang dan regulasi bertindak sebagai agen untuk melakukan perubahan dan rekayasa sosial sehingga proses pelembagaan birokrasi yang melayani semakin kuat.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Aleg PKS Ahmad Heryawan Dorong Terbentuknya Coast Guard Tunggal di Indonesia

Jakarta (13/02) — Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakan (Kemenko KumHAM IMPAS) membahas urgensi instansi tunggal untuk sistem keamanan laut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia memiliki enam lembaga pemangku kepentingan keamanan laut, yaitu TNI AL, Bakamla, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Kemenhub (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai-KPLP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).

"Enam instansi atau lembaga negara sebagai pemangku ketertiban dan keamanan laut dengan kewenangannya masing-masing. Namun hal itu, justru menyulitkan koordinasi dan sinergi dalam keamanan

laut," ungkap Kang Aher saat memimpin raker di Kompleks Parlemen.

Lebih jauh, Ketua Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI ini menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana kerugian negara dari kejahatan perdagangan ilegal hingga penangkapan ikan ilegal mencapai Rp7,6 triliun. Bahkan, kerugian negara berpotensi lebih besar dari angka tersebut.

"Hemat saya disinilah titik urgen instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami oleh

aktivitas ilegal di wilayah laut seperti ilegal fishing, atau penyelundupan tekstil beberapa waktu lalu di perairan Subang, bahkan penyelundupan barang haram seperti narkoba serta penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.

Selain itu, menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini bahwa Indonesia memiliki laut yang sangat luas, bahkan dua per tiga dari daratan. Akan tetapi, faktanya kita menemukan bahwa aspek koordinasi antara instansi-instansi penjaga keamanan laut masih menjadi permasalahan. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendorong kedepan terbentuknya coast guard tunggal di Indonesia.

"Kita dorong kedepan terbentuknya coast guard tunggal di Indonesia, jelas akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan memiliki bergaining posisi dalam menjaga keamanan laut di Indonesia," demikian tutup Kang Aher.



"Hemat saya disinilah titik urgen instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami oleh aktivitas ilegal di wilayah laut seperti ilegal fishing, atau penyelundupan tekstil beberapa waktu lalu di perairan Subang, bahkan penyelundupan barang haram seperti narkoba serta penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata,

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image Istimewa

Percepat Transformasi Digital dan Pendidikan Berkualitas, Habib Idrus : Indonesia Harus Berkolaborasi dengan Belanda

Jakarta (12/02) -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, menekankan urgensi penguatan kerja sama digitalisasi dan pendidikan antara Indonesia dan Belanda dalam courtesy call dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/02/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Habib Idrus menyoroti transformasi digital yang semakin berkembang di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan regulasi, keamanan siber, dan penguatan sumber daya manusia di sektor teknologi.

"Dengan lebih dari 277 juta penduduk dan 204 juta pengguna internet, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat digital di Asia Tenggara," sebutnya.

Namun, imbuh Habib Idrus, masih terdapat berbagai kendala seperti keamanan data yang rentan terhadap serangan siber, kurangnya investasi di sektor digital, serta keterbatasan talenta di bidang teknologi informasi. Sepanjang tahun 2024 saja, lebih dari 1,6 juta serangan siber terdeteksi di Indonesia, mengancam sektor pemerintahan, keuangan, dan bisnis digital.

"Belanda adalah salah satu negara dengan ekosistem

digital paling maju di Eropa, memiliki lebih dari 200 pusat data dan menjadi pusat teknologi AI, cloud computing, serta keamanan siber. Jika Indonesia ingin mempercepat transformasi digital dan memastikan keamanan siber yang kuat, kita perlu belajar dan menjalin kemitraan lebih erat dengan Belanda," ujar Habib Idrus.

Selain itu, Belanda juga memiliki investasi besar dalam infrastruktur digital, termasuk pengelolaan data center berstandar internasional yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

Saat ini, Belanda menjadi salah satu negara dengan regulasi perlindungan data yang ketat dan telah menerapkan kebijakan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam merancang regulasi

Percepat Transformasi Digital dan Pendidikan Berkualitas, Habib Idrus : Indonesia Harus Berkolaborasi dengan Belanda

« SEBELUMNYA

perlindungan data pribadi yang lebih baik.

Indonesia dan Belanda memiliki hubungan dagang yang erat, dengan total perdagangan bilateral mencapai €5,2 miliar pada tahun 2023. Namun, investasi Belanda di sektor digital Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sektor lain seperti manufaktur dan agribisnis.

"Kami mendorong agar Belanda meningkatkan investasi di sektor digital

"Kami ingin mendorong Belanda untuk meningkatkan jumlah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, baik melalui program pemerintah maupun kemitraan dengan universitas dan sektor swasta. Selain itu, bagaimana kebijakan Belanda dalam memberikan kesempatan kerja bagi lulusan Indonesia yang ingin mendapatkan pengalaman sebelum kembali ke tanah air?" ujar Habib Idrus.

Indonesia, terutama dalam pembangunan pusat data, pengembangan AI, dan keamanan siber. Apakah Belanda terbuka untuk menjalin kemitraan lebih strategis dengan Indonesia dalam bentuk program inkubasi startup teknologi, transfer teknologi, serta program pelatihan tenaga kerja di bidang digital?" kata Habib Idrus kepada Dubes Belanda.

Dubes Marc Gerritsen menyambut baik gagasan tersebut dan menegaskan bahwa Belanda siap bekerja

sama dengan Indonesia dalam memperkuat sektor digital, baik melalui investasi langsung maupun program pelatihan bersama.

Selain digitalisasi, Habib Idrus juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, mengingat Belanda adalah salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri.

Saat ini, lebih dari 2.500 mahasiswa Indonesia terdaftar di berbagai universitas di Belanda, dengan minat utama pada teknologi, bisnis, dan ilmu sosial. Universitas seperti Universiteit van Amsterdam, TU Delft, dan Leiden University menjadi pilihan favorit mahasiswa Indonesia karena kualitas akademik yang tinggi dan program yang tersedia dalam bahasa Inggris.

Namun, tantangan utama yang dihadapi mahasiswa Indonesia adalah terbatasnya akses beasiswa dan minimnya peluang magang serta pekerjaan pasca-kuliah.

"Kami ingin mendorong Belanda untuk meningkatkan jumlah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, baik melalui program pemerintah maupun kemitraan dengan universitas dan sektor swasta. Selain itu, bagaimana kebijakan Belanda dalam memberikan kesempatan kerja bagi lulusan Indonesia yang ingin mendapatkan pengalaman



sebelum kembali ke tanah air?" ujar Habib Idrus.

Berdasarkan data dan fakta, jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda meningkat 30% dalam lima tahun terakhir, tetapi beasiswa yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan negara lain seperti Jerman dan Australia.

Banyak lulusan Indonesia

yang kesulitan mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja di Belanda karena aturan visa kerja yang ketat.

ingkat keberhasilan program pertukaran akademik antara universitas Indonesia dan Belanda masih relatif rendah dibandingkan dengan

BERIKUTNYA »»

Percepat Transformasi Digital dan Pendidikan Berkualitas, Habib Idrus : Indonesia Harus Berkolaborasi dengan Belanda

« SEBELUMNYA

negara Eropa lainnya.

Menanggapi hal ini, Dubes Marc Gerritsen menyatakan bahwa pihaknya akan mengeksplorasi kemungkinan peningkatan program beasiswa dan pertukaran akademik, serta mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel bagi mahasiswa Indonesia yang ingin bekerja di Belanda setelah

menyelesaikan studi.

Sebagai penutup, Habib Idrus menegaskan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda harus menghasilkan langkah konkret yang bermanfaat bagi kedua negara, terutama dalam menghadapi tantangan global di era digital dan dalam membangun generasi muda yang lebih kompetitif.

"Kami di Komisi I DPR RI

sangat berharap agar dialog ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nyata. Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang dalam hubungan bilateral, tetapi kini saatnya kita membangun kemitraan yang lebih strategis untuk masa depan, terutama di sektor digital dan pendidikan," tutupnya.

Dubes Belanda menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif DPR RI dalam mendorong kerja sama kedua negara dan menyatakan bahwa Belanda siap menjadi mitra utama Indonesia dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan pendidikan di masa depan.



image istimewa

"Belanda adalah salah satu negara dengan ekosistem digital paling maju di Eropa, memiliki lebih dari 200 pusat data dan menjadi pusat teknologi AI, cloud computing, serta keamanan siber. Jika Indonesia ingin mempercepat transformasi digital dan memastikan keamanan siber yang kuat, kita perlu belajar dan menjalin kemitraan lebih erat dengan Belanda,

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi I DPR RI



Apresiasi Bareskrim Polri

Aleg PKS Desak Pengungkapan Aktor Intelektual Kasus Pagar Laut Tangerang

Jakarta (20/2) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas kerja cepatnya dalam menetapkan empat tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan pembangunan pagar laut di perairan utara Tangerang.

Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohod, Arsin, Sekretaris Desa Ujung Karta, serta dua notaris berinisial SP dan CE.

"Saya mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini. Ini menunjukkan bahwa hukum masih bekerja untuk menindak para pelaku yang berusaha mengalkali sistem pertahanan

kita," ujar Ateng.

Namun, Ateng menegaskan bahwa keempat tersangka bisa saja hanya merupakan eksekutor dari perintah pihak yang lebih berkuasa. Ia mendesak agar pihak kepolisian tidak hanya berhenti pada mereka, tetapi juga menyelidiki aktor intelektual yang menggerakkan para tersangka.

"Kita harus bertanya, siapa

yang menginginkan lahan di atas laut ini? Tidak mungkin seorang kepala desa dan notaris tiba-tiba berinisiatif sendiri. Pasti ada kekuatan yang lebih besar yang bermain di balik layar," tegasnya.

Lebih lanjut, Ateng menyoroti kemungkinan adanya oknum-oknum di lapangan yang melakukan intimidasi dan teror selama penyelesaian kasus ini. Menurutnya, mereka yang terlibat dalam praktik tekanan terhadap saksi dan aparat harus turut diperiksa dan diproses secara hukum.

"Jangan lupa, dalam kasus-kasus seperti ini selalu ada tangan-tangan yang bertugas menekan pihak-pihak tertentu agar tidak bersuara. Ini juga harus diusut karena mereka bagian dari sistem yang merusak," kata Ateng.

Di akhir pernyataannya, Ateng Sutisna menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada level bawah. Ia menekankan pentingnya mengungkap aktor utama yang memiliki kepentingan dalam proyek pagar laut yang kontroversial ini.

"Selama aktor intelektual tidak berhasil disidangkan, berarti masih ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi mereka. Dan ini yang harus kita bongkar bersama," pungkasnya.



"Kita harus bertanya, siapa yang menginginkan lahan di atas laut ini? Tidak mungkin seorang kepala desa dan notaris tiba-tiba berinisiatif sendiri. Pasti ada kekuatan yang lebih besar yang bermain di balik layar,"

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI



image istimewa

Resmi Dilantik, Aleg PKS Rahmat Saleh : Kepala Daerah Baru Dituntut Inovasi Demi Kemandirian Fiskal

Jakarta (20/02) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah yang baru dilantik, Kamis (20/02).

Hal ini sejalan dengan langkah efisiensi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.

Rahmat mengungkapkan, tidak ada satu pun dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang memiliki kemandirian fiskal.

"(Contohnya) Dari total APBD Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak sampai Rp2 triliun," ujarnya.

Ini berarti, untuk membiayai kebutuhan daerah dari dana sendiri, tidak ada satu pun Kabupaten, Kota, termasuk provinsi yang mandiri.

"Oleh karena itu, ketergantungan antara daerah dengan pusat sangat tinggi," jelasnya.

Untuk itu, harus ada kapabilitas khusus yang dimiliki oleh kepala daerah yang baru.

Pertama adalah inovasi. Hal ini diperlukan agar daerah dapat mencari sumber pendanaan alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat.

"Jika hanya bergantung pada APBN, akan muncul masalah baru dalam kepemim-

pin, terutama bagi yang baru menjabat," kata Rahmat.

Kedua, kemampuan beradaptasi. Pola kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung sentralistik.

"Pelantikan kepala daerah sekarang langsung oleh presiden, bukan lagi oleh gubernur, sehingga hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah," jelasnya.

Oleh karena itu, adaptasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.

Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.

"Kepala daerah harus jeli. Bahkan, Presiden sampai meneliti satu per satu program secara detail. Jika semangat efisiensi di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Rahmat.

Keempat, kemampuan membangun jaringan dan

Resmi Dilantik, Aleg PKS Rahmat Saleh : Kepala Daerah Baru Dituntut Inovasi Demi Kemandirian Fiskal

« SEBELUMNYA

kolaborasi. "Jika kepala daerah tidak proaktif dan tidak pandai berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dana APBN bisa berkurang," tegasnya.

Rahmat mencontohkan, pembangunan ruas tol baru di seluruh Indonesia sempat dihentikan.

Namun, melalui komunikasi intensif, tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan. "Jika kita

tidak proaktif dan progresif, (pasti) berat ke depannya," tambah Rahmat.

Untuk itu, dalam menghadapi tantangan ini, kepala daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan pola lama.

Mereka harus siap berinovasi, beradaptasi, dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak.

"Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal," pungkas Rahmat. Selain itu, Rahmat juga

menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

"Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat," ujarnya.

Dalam konteks efisiensi, beberapa daerah telah mulai menerapkan langkah-langkah konkret.

Misalnya, beberapa instansi telah mengatur penggunaan listrik dan air secara ketat serta membatasi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi seperti rapat virtual.

"Langkah-langkah seperti ini perlu diadopsi oleh semua kepala daerah untuk mencapai efisiensi yang diharapkan," kata Rahmat.

Rahmat juga mengingatkan, kepala daerah harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik harus ditingkatkan, dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung," tegasnya.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Rahmat berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif bagi Sumatera Barat.

"Kita semua berharap, dengan semangat baru ini, Sumatera Barat dapat lebih maju dan mandiri secara fiskal," tutupnya.



"Kepala daerah harus jeli. Bahkan, Presiden sampai meneliti satu per satu program secara detail. Jika semangat efisiensi di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan,

**H. RAHMAT SALEH,
S.Farm., M.I.P.**

Anggota Komisi II DPR RI

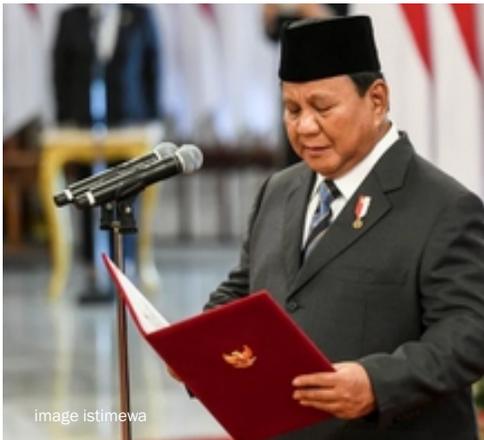


image istimewa



Catat Yuk! Jadual Libur Sekolah di Ramadan 2025

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama
untuk Pembelajaran Semasa Ramadan



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri



Momen ramadan bisa menjadi kesempatan emas untuk **meningkatkan prestasi belajar** melalui kegiatan yang terarah di sekolah. Lomba keagamaan, diskusi nilai-nilai Ramadan, atau kajian keislaman dapat menjadi bagian dari kurikulum yang memperkuat iman sekaligus menjaga semangat belajar.

Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A
Anggota DPR RI



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri

DPR RI | Grafis: Heri



Tanggal Libur
27 Februari
s/d
5 Maret
Kegiatan belajar mandiri
dilingkungan keluarga, tempat ibadah,
atau masyarakat

26 Maret
s/d
8 April
Libur Idulfitri

*Aturan diteken
Mendikdasmen, Menag,
dan Mendagri



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri

Sumber: itjen.kemdikbud.go.id | Grafis: Heri



image istimewa

Kunker ke Polda Lampung, Komisi III FPKS Soroti Dugaan Permainan Barbuk Narkoba

Lampung (21/02) — Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Lampung untuk meninjau berbagai hal terkait pelaksanaan reformasi kultur dan transformasi layanan publik di wilayah ini.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi yang turut dalam rombongan mengapresiasi upaya Polres Lampung Selatan dalam membuat maklumat yang menyatakan kesanggupan mereka untuk memberikan

“ Saya kira ini adalah langkah positif dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Namun, saya berharap agar layanan serupa dapat diakses pada hari libur, mengingat tidak semua warga dapat datang ke kantor polisi pada hari kerja. Hal ini sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Terutama, kata pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, dalam hal penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta pelayanan Surat Izin Keramaian dan STTP kegiatan masyarakat.

“ Saya kira ini adalah langkah positif dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Namun, saya berharap agar layanan serupa dapat diakses pada hari libur, mengingat tidak semua warga dapat datang ke kantor polisi pada hari kerja. Hal ini sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel tersebut.

Namun disisi lain Aboe Bakar juga memberikan catatan tentang adanya isu permainan

bukti narkoba di Polda Lampung.

“Beredarnya rumor terkait penangan barang bukti narkoba di Polda Lampung, bahwa tidak semua barang bukti tersebut dimusnahkan dan ada dugaan adanya oknum yang menjual barang bukti tersebut. Saya kira ini perlu di klarifikasi langsung ke Kapolda,” ungkap Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.

Menurut rumor, imbuhnya, yang terlibat dalam persoalan ini bukan hanya satu orang.

“Bahkan, ada desas-desus bahwa Subdit 1 Ditreskrimsus Narkoba Polda Lampung dibubarkan karena dugaan keterlibatan sejumlah oknum di dalamnya. Tentu ini harus dijelaskan dengan baik oleh Kapolda”, tukas Sekjend DPP PKS tersebut.



Aleg FPKS Saadiah Uluputty Dorong Bulog Serap Gabah Petani dengan Harga Layak

Jakarta (12/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, terus bergerak cepat memastikan kebijakan pemerintah terkait penyerapan gabah oleh Bulog benar-benar berpihak kepada petani, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Bapanas, Bulog dan PT Pupuk Indonesia, Saadiah menegaskan pentingnya realisasi janji Presiden bahwa Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, tanpa batasan kuantitas.

Dalam forum tersebut, Politisi PKS ini menyoroti bahwa kebijakan ini telah membangkitkan optimisme petani yang sebelumnya mulai beralih ke hortikultura akibat ketidakpastian harga gabah.

Namun, Saadiah mempertanyakan mengapa Bulog hanya menetapkan target penyerapan sebanyak 3 juta ton per tahun,

sementara produksi padi nasional mencapai 28 juta ton per tahun.

"Ketika Presiden menyatakan bahwa BULOG dapat menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500, petani merasa sangat optimis. Mereka ingin kembali menanam padi. Namun, jika BULOG hanya menyerap 3 juta ton, bagaimana nasib petani di daerah lain, khususnya di Maluku dan Papua?," tegas Saadiah pada forum Rapat.

Ia juga mengkritisi alokasi penyerapan gabah yang belum merata. Dalam dokumen BULOG, beberapa provinsi seperti Maluku hanya mendapatkan alokasi 430 ton, sementara

Papua Selatan bahkan tidak tercantum dalam skema penyerapan.

Padahal, kata Saadiah, lahan sawah baru seluas satu juta hektar telah dibuka di berbagai wilayah, yang seharusnya juga mendapat perhatian dalam kebijakan penyerapan gabah.

Sebagai langkah konkret, Anggota Banggar FPKS ini langsung menggandeng BULOG untuk turun bertemu dengan petani dan mendengar langsung aspirasi mereka.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengeluarkan kebijakan tanpa eksekusi yang jelas di lapangan.

"Kami ingin ada solusi nyata. Jangan sampai petani hanya diberikan harapan tanpa kepastian. BULOG harus hadir di tengah petani dan memastikan harga gabah tetap stabil serta menguntungkan bagi mereka," tegasnya.

Legislator dapil Maluku ini menekankan bahwa pemerintah harus benar-benar menjaminkan kesejahteraan petani dengan memperbaiki mekanisme penyerapan gabah agar lebih adil dan merata.

"Saya melalui Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar implementasinya tidak merugikan petani di daerah," seru Saadiah.

Dengan langkah cepat ini, Saadiah Uluputty berharap petani dapat kembali bersemangat menanam padi dan tidak kh-



"Kami ingin ada solusi nyata. Jangan sampai petani hanya diberikan harapan tanpa kepastian. BULOG harus hadir di tengah petani dan memastikan harga gabah tetap stabil serta menguntungkan bagi mereka,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

awatir dengan harga jual gabah.

Ia meminta Bulog dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target penyerapan dan memastikan tidak ada daerah yang terabaikan.

"Petani butuh kepastian, bukan sekadar janji. Kita harus memastikan bahwa setiap kilogram gabah yang dihasilkan bisa terserap dengan harga yang layak," pungkasnya Saadiah Uluputty.



Aleg PKS Johan Rosihan Apresiasi Langkah Polri Usut Kasus Pagar Laut dan Minta Ungkap Pelaku Utama

Jakarta (11/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Bareskrim Polri dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pagar Laut di Desa Kohod, Tangerang.

Pengegedahan rumah dan kantor kepala desa yang dilakukan pada Senin (11/2) menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan.

"Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya nelayan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari

proyek-proyek seperti ini," ujar Johan Rosihan.

Selanjutnya Johan menegaskan, bahwa pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada kepala desa.

Menurutnya, pengegedahan ini harus menjadi langkah awal untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor utama yang diduga menjadi dalang di balik dugaan penyimpangan anggaran proyek tersebut.

"Kami berharap Polri dapat menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung

jawab hingga ke level tertinggi. Jangan sampai hanya aktor di lapangan yang diproses, sementara pihak yang merancang dan mengendalikan dugaan korupsi ini luput dari jeratan hukum," tegasnya.

Johan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kasus ini serta mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan proyek-proyek serupa tidak lagi menjadi ladang korupsi.

"Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Kami juga mendorong pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan agar program-program untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan benar-benar berjalan sesuai tujuan, tanpa ada kebocoran anggaran," tutup Johan.

Kasus dugaan korupsi proyek Pagar Laut ini menjadi perhatian publik setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Dengan langkah tegas yang diambil oleh Polri, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat," tutup Johan.



"Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Kami juga mendorong pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan agar program-program untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan benar-benar berjalan sesuai tujuan, tanpa ada kebocoran anggaran,"

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Riyono 'Caping' : DPR Harap Anggaran Swasembada Pangan Jangan Dipotong

Jakarta (13/02) — Pemerintah Prabowo sedang mengencangkan ikat pinggang dalam urusan keuangan. Efisiensi besar - besaran

di lakukan kepada kementerian dan lembaga negara demi pemenuhan program strategis nasional makan bergizi gratis (MBG).

“Kita minta agar anggaran Kementan khususnya swasembada pangan jangan di potong, kabar akan di potong 10 T untuk kementan jangan dilakukan, swasembada bisa terancam gagal,”

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI

Tahun 2025 butuh 400 T untuk menjalankan program ini. Saat ini baru tersedia 71 T, masih kurang 329 T agar bisa berjalan menyeluruh. Rencana efisiensi semua KL ditarget 305 Triliun. Bukan angka yang sedikit di ngah postur anggaran APBN saat ini.

“Kita memahami program MBG adalah salah satu ujung tombak perbaikan kualitas SDM anak sekolah kita saat ini, maka perlu anggaran besar. Anggaran yang bersifat non strategis di KL memang harus di kurangi” papar Riyono 'Caping' Aleg DPR FPKS Dapil VII Jatim ini.

Kementan dibebani untuk program swasembada pangan khususnya beras di 2025 adalah 32 juta ton beras dan tidak akan impor beras lagi. Program cetak sawah baru, brigade pangan, petani millineal dan juga berbagai program turunan swasembada pangan harus tetap

jalan.

“Kita minta agar anggaran Kementan khususnya swasembada pangan jangan di potong, kabar akan di potong 10 T untuk kementan jangan dilakukan, swasembada bisa terancam gagal,” tambah Riyono.

Melalui Inpres 1 tahun 2025 Prabowo meminta efisiensi KL dengan harapan bisa untuk memenuhi program MBG. Swasembada sebagai target utama 2025 ini juga membutuhkan anggaran besar, kementan dapat alokasi 23 T untuk 2025.

“Sekali lagi, fungsi budgeting DPR adalah merancang dan membahas APBN dengan pemerintah. Kita minta agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang cukup bagi suksesnya Swasembada Pangan,” tutup Riyono.



Wakil Ketua Komisi IV DPR FPKS Dukung Inpres No. 2 Tahun 2025 untuk Perkuat Swasembada Pangan

Jakarta (13/02) --- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan.

Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Menurut Abdul Kharis, pengelolaan irigasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan sektor pertanian.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Inpres tersebut.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur irigasi guna menunjang sektor pertanian. Namun, implementasi di lapangan harus diawasi dengan ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani," ujar Abdul Kharis dalam keterangannya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program ini dan

memastikan pembangunan serta rehabilitasi irigasi dilakukan secara merata, terutama di daerah-daerah dengan potensi pertanian yang tinggi.

Inpres No. 2 Tahun 2025 menargetkan percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas, termasuk Aceh,

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.

Pendanaan program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Abdul Kharis berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

"Kami akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Indonesia," tutupnya.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur irigasi guna menunjang sektor pertanian. Namun, implementasi di lapangan harus diawasi dengan ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani,

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



Aleg PKS Hendry Munief : Efisiensi Anggaran Mesti Mendukung Sektor Produktif

Jakarta (14/02) -- Kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto banyak disalahartikan jajaran kementerian dan lembaga setingkat Menteri. Dari Inpres nomor 1 tahun 2025 itu mesti dapat mendukung peningkatan sektor produktif.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA selalu anggota Komisi VII saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025) pagi menyampaikan semangat bapak presiden ingin bangsa ini makin mandiri, berlari kencang menjadi negara maju.

"Yang kita maknai kebijakan presiden ini ingin Indonesia ini lebih maju dan kuat ke depannya. Maka beliau menginstruksikan agar adanya efektifitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan," terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.

Salah satu output yang beliau harapkan dari kebijakan ini agar sektor produktif seperti geliat UMKM, perindustrian, pariwisata dan lainnya makin diperhatikan dan berkembang.

"Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Disitu jelas apa-apa saja yang boleh di atur ulang anggarannya. Ada 16 item. Maka kita minta dari hasil

efisiensi, sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi." tegas Hendry Munief

Sektor produktif itu, katanya, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Banyak program pemerintah yang selama ini menyasar dan meningkatkan produktifitas

UMKM.

Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil akan sangat membahayakan ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi hingga perekonomian global yang tidak menentu.

"Selain itu sektor perindustrian, ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, industri IKM, industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional," tegas Hendry Munief yang juga Ketua Perhimpunan Peniaga Tanah Melayu (P2TM) Provinsi Riau ini.

"Yang kita maknai kebijakan presiden ini ingin Indonesia ini lebih maju dan kuat ke depannya. Maka beliau menginstruksikan agar adanya efektifitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Komisi VII DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakj Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



image istimewa

Terima Aspirasi Pertuni, Fikri Faqih Perjuangkan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Pemijat Tunanetra

Jakarta (17/02) --- Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) terus berupaya memperjuangkan pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) khusus untuk pemijat tunanetra.

Ketua Umum Pertuni, Setiawan Gema Budi, menyampaikan bahwa bertemu dengan perwakilan Komisi VIII DPR RI untuk membahas aspirasi ini.

"Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih. Kami ingin mewujudkan lembaga sertifikasi profesi, khususnya untuk 'massage' karena mayoritas anggota Pertuni adalah pemijat," kata Setiawan, Kamis (13/02/2025) di ruang kerja Dr. Abdul Fikri Faqih, Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat.

Setiawan menjelaskan bahwa LSP ini akan memberikan payung hukum bagi para pemijat tuna netra, sehingga mereka memiliki kompetensi yang setara dan diakui secara nasional. Dengan adanya LSP, para pemijat tunanetra akan mendapatkan uji kompetensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

"Kami sudah beraudiensi dengan Kementerian Sosial dan diterima oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Kami membutuhkan surat rekomendasi dari Kemensos untuk melangkah ke tahap

selanjutnya, yaitu standarisasi kompetensi di Standar Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Pertuni berharap Kementerian Sosial dapat bermitra dengan Komisi VIII DPR RI untuk memberikan rekomendasi yang dibutuhkan, sehingga LSP ini dapat segera diwujudkan di Indonesia.

Setiawan menambahkan bahwa Pertuni akan menjadi satu-satunya organisasi masyarakat yang mengurus terkait 'Public Private Partnership' (P3) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Semoga Kementerian Sosial dapat memberikan rekomendasi tersebut, sehingga lembaga sertifikasi profesi ini bisa diwujudkan di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi Pertuni yang menemuinya pada Kamis (13/02/2025).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya perubahan mindset masyarakat terhadap

Terima Aspirasi Pertuni, Fikri Faqih Perjuangkan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Pemijat Tunanetra

« SEBELUMNYA

penyandang disabilitas.

Fikri yang pernah terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengingatkan bahwa pengakuan eksistensi Indonesia di dunia internasional juga berkat peran serta penyandang disabilitas.

Fikri lantas mencontohkan bagaimana atlet-atlet disabilitas Indonesia mampu meraih prestasi membanggakan di berbagai ajang olahraga internasional.

"Kita ini bangsa Indonesia dan eksistensi kita itu diakui karena juga salah satunya

penyandang disabilitas di Indonesia. Bahkan atlet-atlet kita yang normal itu prestasinya mungkin kadang-kadang masih mengecewakan dan atlet kita yang penyandang disabilitas ini luar biasa," jelas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah ini.

Fikri juga menyoroti pentingnya penanganan yang tepat terhadap problematika yang dihadapi penyandang disabilitas.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan selama ini masih bersifat 'charity based', atau didasarkan pada rasa kasihan.

Padahal, kata dia, seharusnya pendekatan yang

digunakan adalah 'right based', yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"Jadi basisnya adalah mewujudkan atau menghadirkan hak-hak. Jadi hak-hak mereka itu apa? Oleh karenanya tadi saya ngobrol sekilas, ini trotoar kita ini kadang-kadang hanya lip service, ada guiding block, ada RAM dan sebagainya. Ternyata tidak fungsional dengan efektif. Ini saya kira perlu evaluasi kita semuanya bahwa ini bukan karena kasihan, bukan. Tapi mereka punya hak," tegasnya.

Ke depan, Fikri berharap akan ada harmonisasi yang lebih baik antar kementerian dalam penanganan isu disabilitas.

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka.

"Buktinya undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2016. Itu tidak jadi kalau tidak ada kontribusi besar dari penyandang disabilitas. Akhirnya masukan-masukan itu diakomodir, akhirnya UU itu jadi. Dan ini sebagai konsekuensi dari ratifikasi internasional. Apa namanya? 'Convention on the Rights for Persons with Disabilities (CRPD)'. Saya kira kita harus menjadi penduduk dunia yang taat dengan kesepakatan-kesepakatan internasional," pungkasnya.



"Kita ini bangsa Indonesia dan eksistensi kita itu diakui karena juga salah satunya penyandang disabilitas di Indonesia. Bahkan atlet-atlet kita yang normal itu prestasinya mungkin kadang-kadang masih mengecewakan dan atlet kita yang penyandang disabilitas ini luar biasa,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Netty: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bisa Turunkan Beban Pembiayaan Kesehatan

Jakarta (14/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyambut baik peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Program yang ditujukan untuk masyarakat yang berulang tahun, baik anak-anak, remaja, dewasa dan lansia ini merupakan kebijakan yang bagus dan bermanfaat. Bahkan untuk ibu hamil dan balita disiapkan program pemeriksaan kesehatan khusus," ujarnya dalam keterangan media, Jumat, (14/02).

Menurutnya, program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini kondisi kesehatan yang dapat diakses di puskesmas atau di posyandu.

Oleh sebab itu, politisi PKS ini mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program PKG dengan sebaik-baiknya.

"Masyarakat tidak perlu takut memeriksakan diri dan mengetahui kondisi

kesehatannya. Dengan begitu dapat mencegah datangnya serangan penyakit yang mendadak," ujar Netty.

Upaya pemerintah ini, lanjut Netty, adalah salah satu langkah pemerintah membudayakan preventif kesehatan di masyarakat.

Dengan demikian Kementerian dan lembaga terkait, termasuk media, harus membantu sosialisasi program ini agar diketahui masyarakat luas.

"Jangan sampai program bagus ini malah tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa melalui upaya membangun budaya promotif dan preventif diharapkan kondisi kesehatan

masyarakat semakin baik sehingga dapat mengurangi beban biaya pengobatan yang ditanggung negara.

"Pada 2024, beban pembiayaan JKN mencapai sekitar Rp.175 triliun, dimana sebagian dana pembiayaan tersebut digunakan untuk penanganan penyakit katastrofik, seperti jantung, kanker, stroke dan gagal ginjal yang sebenarnya dapat dicegah dan dideteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan."

Netty juga meminta masyarakat untuk membangun budaya preventif kesehatan melalui pola hidup bersih dan sehat.

"Tidak cukup dengan pemeriksaan kesehatan saja. Lakukan pola hidup bersih dan sehat mulai dari diri sendiri dan di rumah. Stop merokok, asupan bergizi dan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur serta kurangi konsumsi gula, garam dan lemak," tutup Netty.



"Masyarakat tidak perlu takut memeriksakan diri dan mengetahui kondisi kesehatannya. Dengan begitu dapat mencegah datangnya serangan penyakit yang mendadak,"

**Dr. Hj. NETTY
PRASETIYANI, M.Si**
Anggota Komisi IX DPR RI

Soal THR Driver Ojol, Politisi PKS Kurniasih Dorong Regulasi Kesejahteraan Driver Ojol yang Lebih Baik

Jakarta (21/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Ketenagakerjaan yang telah duduk bersama para mitra driver ojek online

untuk mendengarkan aspirasi dan merumuskan solusi terkait tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum hari raya keagamaan.

"Kami memahami kegelisahan yang dirasakan teman-teman mitra driver ojek online, terutama dalam memperjuangkan hak mereka menjelang hari raya. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang bersedia menerima dan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara langsung," ujar Kurniasih di Jakarta, Jumat (21/02).

Kurniasih menambahkan, penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan yang dihadapi mitra driver ojek online tidak bisa hanya bergantung pada Kementerian Ketenagakerjaan

semata.

Kurniasih mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Koordinator dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan regulasi yang komprehensif.

Ia menyoroti perlunya pengaturan yang jelas bagi perusahaan operator ojek online agar kembali menjalankan fungsi sebagai operator transportasi, bukan sekadar operator teknologi informasi (IT).

"Sudah saatnya kita melakukan perubahan kebijakan bagi operator ojek online. Status perusahaan operator harus dikembalikan sebagai operator transportasi sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan, bukan hanya sebagai

operator IT," jelas Kurniasih.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menyebut perlu ada pemisahan yang jelas unit bisnis IT dengan unit bisnis lain misal khusus unit bisnis transportasi, unit bisnis kurir dan lainnya. Sebab saat ini banyak unit bisnis yang menerapkan kebijakan mitra dengan aplikasi.

Lebih lanjut, Kurniasih menekankan pentingnya mengubah hubungan kerja antara operator ojek online dan mitra driver menjadi hubungan perusahaan dan karyawan. Menurutnya, perubahan ini tidak hanya berdampak pada jaminan THR, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif bagi para pekerja.

"Jika hubungan ini diatur sebagai hubungan perusahaan dan karyawan, maka ke depan tidak hanya soal THR yang terjamin, tetapi juga hak-hak perlindungan sosial lainnya bagi para mitra driver," pungkasnya.

Sebagai Wakil Rakyat di Komisi IX DPR RI, Kurniasih



"Kami memahami kegelisahan yang dirasakan teman-teman mitra driver ojek online, terutama dalam memperjuangkan hak mereka menjelang hari raya. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang bersedia menerima dan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara langsung,"

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Mufidayati berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk mitra driver ojek online,

agar mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak dalam hubungan kerja mereka.



image istimewa

Aleg PKS Alifudin Apresiasi PP Nomor 6 Tahun 2025 Soal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Jakarta (20/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin memberikan apresiasi terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PP ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan dampak pandemi yang belum sepenuhnya hilang.

Menurut Alifudin, langkah ini merupakan sebuah terobosan penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Alifudin menyampaikan apresiasi khususnya terhadap peningkatan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam regulasi baru ini, pekerja yang terdampak kehilangan pekerjaan akan menerima manfaat penggantian upah sebesar 60% dari gaji sebelumnya, yang sebelumnya hanya sebesar 45%.

Menurutnya, peningkatan persentase tersebut akan sangat membantu pekerja dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

"Langkah ini adalah bukti bahwa pemerintah mendengar suara pekerja dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan

an lebih bagi mereka yang sedang dalam kesulitan," kata Alifudin.

Selain itu, Alifudin juga mengapresiasi penurunan tarif iuran yang menjadi 0,36% dari sebelumnya 0,4% upah. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah yang sangat positif bagi pekerja, karena dengan penurunan tarif iuran, pekerja tetap dapat mendapatkan manfaat maksimal dari program JKP tanpa terbebani oleh biaya iuran yang tinggi.

"Pemerintah telah membuat kebijakan yang bijak dengan menurunkan tarif iuran, sehingga para pekerja bisa mendapatkan manfaat yang optimal dengan kontribusi yang lebih terjangkau," ujar Alifudin.

Meski demikian, Alifudin mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besar kecilnya manfaat dan iuran yang ditetapkan, tetapi juga pada implementasi yang baik di lapangan.

"Kami berharap program JKP ini dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta

Aleg PKS Alifudin Apresiasi PP Nomor 6 Tahun 2025 Soal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

« SEBELUMNYA

dapat diakses dengan mudah oleh pekerja yang membutuhkan. Penyaluran manfaat harus tepat sasaran dan tidak ada diskriminasi," tegasnya.

Alifudin juga mendorong agar seluruh pekerja di Indonesia segera mendaftarkan diri dalam program JKP, guna memastikan bahwa mereka terlindungi apabila suatu saat mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Ini adalah hak yang harus dimanfaatkan oleh setiap pekerja. Jangan tunggu sampai terlambat, karena dengan ada-

nya JKP, pekerja akan memiliki rasa aman saat menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Alifudin kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja lainnya, seperti hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan jaminan sosial lainnya.

"Saya juga berharap agar pemerintah terus memperhatikan hak-hak pekerja lainnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan rasa aman dan dihargai secara adil. Pekerja adalah bagian penting dari pembangunan bangsa ini," tutup Alifudin.



keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besar kecilnya manfaat dan iuran yang ditetapkan, tetapi juga pada implementasi yang baik di lapangan. Kami berharap program JKP ini dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta dapat diakses dengan mudah oleh pekerja yang membutuhkan. Penyaluran manfaat harus tepat sasaran dan tidak ada diskriminasi,"

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Rapat Dengan OJK, Anis Byarwati Minta OJK Lebih Cepat Tangani Pengaduan Konsumen

Jakarta (20/02) --- Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisaris OJK (DK OJK) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). PUJK adalah lembaga jasa keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.

Rapat ini mengangkat tema perlindungan konsumen. Hadir dalam rapat ini, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati.

Legislator dari Jakarta Timur ini menyarankan kepada OJK agar memiliki indikator keberhasilan dari perlindungan konsumen.

Menurutnya, OJK perlu membuat alur yang lebih sistematis agar perlindungan terhadap konsumen dapat benar-benar diwujudkan.

"OJK perlu merumuskan Key Performance Indicator, sebagai tolak ukur sejauh mana OJK telah berhasil memberikan perlindungan kepada konsumen," tuturnya.

Melanjutkan pandangannya, Anis menjelaskan bahwa perlu dimasukkan di dalam KPI salah satunya adalah kecepatan OJK dalam menangani pengaduan atau batas waktu yang diperlukan OJK untuk merespon pengaduan konsumen.

"Berapa lama waktu yang dibutuhkan OJK untuk menindaklanjuti pengaduan

didalam mendapatkan pelayanan dari OJK.

"Dengan adanya berbagai indikator yang dibuat, kita dapat melihat dan mengukur sejauh mana indikator-indikator tersebut sudah bisa dicapai. Hal ini juga bisa menjadi sarana legislative untuk melakukan fungsi pengawasannya," papar Anis.

"Dengan dilengkapinya berbagai sarana yang diperlukan OJK dalam pelayanan dan perlindungan konsumen, diharapkan akar masalah dari banyaknya masalah yang dialami oleh pelaku usaha jasa keuangan dan konsumennya, dapat diatasi dengan baik," pungkash Anis mengakhiri.

"Dengan dilengkapinya berbagai sarana yang diperlukan OJK dalam pelayanan dan perlindungan konsumen, diharapkan akar masalah dari banyaknya masalah yang dialami oleh pelaku usaha jasa keuangan dan konsumennya, dapat diatasi dengan baik,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Aleg PKS Haji Jalal Dorong Transparansi dan Percepatan Pengembangan Industri Baterai di Indonesia

Jakarta (18/02) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir menyoroti sejumlah isu strategis terkait perkembangan industri baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam pembahasannya, pria yang akrab disapa Haji Jalal menekankan pentingnya pencapaian target populasi kendaraan listrik berbasis baterai yang telah dicanangkan pemerintah, yakni 6 juta unit motor listrik dan 400 ribu unit mobil listrik pada akhir tahun 2025.

Menurut data terbaru dari Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik saat ini masih jauh dari target, dengan hanya 160.578 motor listrik dan 33.555 mobil listrik terdaftar hingga November 2024.

"Perbedaan signifikan antara target dan realisasi ini perlu dicermati bersama. Kami meminta PT Indonesia Battery Corporation (IBC) dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan langkah-langkah yang sudah

diambil guna mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk bagaimana target populasi terhadap kendala yang dihadapi," ujar Haji Jalal.

Haji Jalal juga mendukung penuh sinergi yang dilakukan oleh BUMN seperti Pertamina, PLN, Antam, dan Inalum dalam mendukung pengembangan baterai di dalam negeri. Namun, ia meminta transparansi progres dari empat proyek besar yang sedang dijalankan PT IBC, yaitu proyek Dragon, Titan, BESS, dan Volt.

"Kami butuh update terkini mengenai perkembangan proyek-proyek ini, termasuk dampaknya terhadap rantai pasok global baterai lithium-ion. Jangankan sampai ada stagnasi yang menghambat tujuan menjadi

Kan Indonesia sebagai pemain utama di industri baterai global," tegasnya.

Selain itu, Haji Jalal juga menekankan pentingnya kolaborasi riset dan pengembangan (litbang) antara PT IBC dengan lembaga penelitian seperti BRIN, ITB, UGM, ITS, UNDIPI, UNPAD dan UI dan lain-lain baik kampus negeri maupun swasta. Hal ini diperlukan untuk menciptakan inovasi teknologi baterai yang mendukung kemandirian bangsa.

"Litbang adalah kunci keberlanjutan industri baterai nasional. Kami ingin tahu sejauh mana kolaborasi ini berjalan dan hasil konkret yang sudah dicapai," tambahnya.

Haji Jalal menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengembangan kendaraan listrik dan swasembada energi, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo. Namun, Haji Jalal meminta komitmen nyata dari semua pihak untuk mewujudkan visi tersebut demi transisi menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon.



"Kami butuh update terkini mengenai perkembangan proyek-proyek ini, termasuk dampaknya terhadap rantai pasok global baterai lithium-ion. Jangan sampai ada stagnasi yang menghambat tujuan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di industri baterai global,"

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI

Rapat ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan BUMN untuk mempercepat langkah nyata

dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dan berkelanjutan.



FPKS Sambut Baik Pengesahan
Perubahan Keempat UU Minerba

Muh Haris: Wujud Pengelolaan Tambang Merah Putih

Jakarta (18/02) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyambut baik pengesahan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam sidang paripurna DPR RI hari ini.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa revisi ini merupakan langkah maju dalam tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan.

"Kami di PKS menyambut baik pengesahan perubahan keempat UU Minerba ini. Revisi ini adalah upaya untuk mewujudkan 'pengelolaan tambang merah putih', yakni pengelolaan tambang yang inklusif dan bertanggung jawab," ujar Muh Haris kepada wartawan di

Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurutnya, perubahan dalam UU Minerba ini membawa berbagai kebijakan baru yang lebih berpihak pada kepentingan nasional dan masyarakat luas.

"Ada beberapa poin penting dalam revisi ini. Misalnya, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara kini dapat diberikan secara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan,"

jelas Muh Haris yang juga sebagai Tim Perumus (Timus) RUU Minerba DPR RI.

Selain itu, kata Muh Haris, UU Minerba yang baru juga memberikan dukungan bagi dunia pendidikan.

"Perguruan tinggi kini bisa mendapatkan pendanaan dari hasil pengelolaan WIUP dan WIUPK yang dimiliki BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Ini menjadi peluang bagi kampus untuk lebih mandiri dan meningkatkan kualitas pendidikan," tambahnya.

Lebih lanjut, Muh Haris menyoroti kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor mineral dan batu bara.

"Ini langkah yang sangat baik. Dengan aturan ini, kita memastikan sumber daya alam kita terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, baru sisanya bisa diekspor. Ini sesuai dengan semangat kemandirian energi dan industri dalam negeri," tegasnya.

Fraksi PKS berharap implementasi UU Minerba yang baru ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Kami ingin pastikan bahwa tambang dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Harapannya, revisi UU Minerba ini membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.



"Ini langkah yang sangat baik. Dengan aturan ini, kita memastikan sumber daya alam kita terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, baru sisanya bisa diekspor. Ini sesuai dengan semangat kemandirian energi dan industri dalam negeri,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI



Aleg PKS Nevi Zuairina Minta Pengawasan BBM Subsidi Ditingkatkan dan Pelanggan Diberi Efek Jera

Jakarta (18/02) --- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan memberikan efek jera bagi para pelanggan.

Menurut Nevi, selama ini pengawasan BPH Migas terhadap BBM subsidi telah berjalan cukup baik, termasuk melalui verifikasi volume, uji petik di lapangan, serta pengecekan CCTV di berbagai SPBU.

Namun, masih ditemukan kasus penyelewengan, seperti penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak serta distribusi yang tidak sesuai aturan.

"Kami mengapresiasi kinerja BPH Migas, tetapi juga mendesak agar pengawasan lebih diperketat. Jika ada SPBU atau lembaga penyalur yang terbukti menyelewengkan BBM subsidi, harus diberikan sanksi tegas. Jangan sampai ada pembiaran yang berulang" ujar Nevi.

Politis PKS ini juga menyoroti lonjakan penerbitan surat rekomendasi subsidi BBM oleh pemerintah daerah, yang meningkat menjadi 1.583 surat di tahun 2024.

Menurutnya, penting bagi BPH Migas untuk memastikan bahwa surat rekomendasi ini benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak, seperti sektor pertanian, perikanan,

dan UMKM.

Selain itu, Legislator asal Sumatera Barat ini mendukung usulan Komisi XII agar pengawasan berbasis teknologi semakin dioptimalkan.

Pemanfaatan QR Code dan aplikasi XStar untuk distribusi BBM subsidi dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

"Teknologi bisa membantu, tetapi tetap harus ada pengawasan manusia. Kami tidak ingin sistem QR Code ini justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Terkait dengan LPG 3 kg, Anggota DPR RI Dapil Sumbar II ini menyoroti perlunya penyesu-

aian regulasi agar BPH Migas bisa lebih aktif dalam mengawasi distribusinya.

Saat ini, BPH Migas hanya berwenang mengawasi distribusi gas bumi melalui pipa, sementara LPG 3 kg masih berada di luar cakupan pengawasannya.

"Jika memang diperlukan perubahan UU Migas agar BPH Migas bisa mengawasi distribusi LPG 3 kg, maka hal ini perlu segera dibahas lebih lanjut di Komisi XII," kata Nevi.

Sebagai langkah ke depan, Nevi Zuairina meminta agar BPH Migas lebih transparan dalam menentukan SPBU mana yang akan diuji petik dan diawasi CCTV-nya. Ia juga menekankan bahwa efek jera harus lebih kuat agar tidak ada lagi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.

"Kami ingin agar setiap pelanggaran ditindak tegas, dan semua badan usaha yang terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi bisa benar-benar disiplin dan patuh terhadap aturan yang ada," pungkas Nevi Zuairina.

"Kami ingin agar setiap pelanggaran ditindak tegas, dan semua badan usaha yang terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi bisa benar-benar disiplin dan patuh terhadap aturan yang ada,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



image istimewa

Sidak PT Monokem Surya, Komisi XII FPKS Meitri Soroti Insiden Kecelakaan Kerja dan Kejanggalan Perizinan

Jakarta (17/02) --- Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Monokem Surya. Sidak dilakukan menyusul insiden ledakan yang terjadi pada smelter titanium di perusahaan tersebut sehingga menelan korban sebanyak dua pekerja meninggal dunia dan satu pekerja lainnya mengalami luka bakar pada 16 Desember 2024 silam.

"Kami menduga sejak awal terdapat celah dalam prosedur keselamatan yang tidak diterapkan dengan baik. Dari sidak ini akhirnya terungkap bahwa kasus ledakan tersebut terjadi akibat perusahaan lalai dalam memeriksa kondisi performa mesin. Dalam keterangan lain, disebutkan ada SOP yang belum sepenuhnya dijalankan terkait mekanisme pendinginan tungku sebelum dibuka," terang Meitri usai sidak Komisi XII DPR RI di Karawang yang berlangsung dari tanggal 14-16 Februari 2025.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini meminta perusahaan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan keselamatan kerja. Meitri mendesak manajemen memastikan setiap pekerja memahami dan mematuhi protokol keselamatan serta meningkatkan sistem pelaporan dan evaluasi terhadap potensi risiko di area kerja.

"Dalam kunjungan lapang-

an ini Komisi XII DPR melihat bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kondisi yang kurang memadai untuk industri dengan risiko tinggi, dimana melibatkan bahan berbahaya dan proses bertekanan tinggi dengan tekanan suhu di tungku yang dapat mencapai 1200 derajat celsius. Untuk itu, kami mendorong penataan ulang terhadap sistem K3 dan mendesak perusahaan agar memastikan keselamatan pekerja sebagai prioritas utama," jelasnya.

Lebih lanjut, Meitri juga meminta agar perusahaan menunaikan tanggung jawabnya secara penuh terhadap pekerja yang menjadi korban ledakan smelter. Selain memberikan santunan yang memadai bagi keluarga korban yang ditinggalkan, Meitri juga meminta agar korban luka dijamin biaya pengobatannya hingga tuntas

BERIKUTNYA >>>

Sidak PT Monokem Surya, Komisi XII FPKS Meitri Soroti Insiden Kecelakaan Kerja dan Kejanggalan Perizinan

« SEBELUMNYA

dan perusahaan menjamin kesempatannya untuk bisa kembali bekerja apabila kondisi kesehatannya sudah memungkinkan kembali bekerja.

“Tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga korban, baik dalam hal kompensasi finansial maupun jaminan sosial menjadi hal yang tidak boleh terelakan. DPR akan mengawal penyelesaian hak-hak korban

sehingga tertunaikan secara tuntas tanpa kurang sedikitpun. Di sisi lain, ini juga menjadi peringatan bagi semua pihak, manajemen maupun pekerja, agar meningkatkan standar keselamatan di tempat kerja ke depannya.” ujarnya.

Selain soal insiden kecelakaan kerja, Meitri juga menyortir kejanggalan terkait izin operasi perusahaan yang disebut belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dia menekankan pentingnya perusahaan mematuhi regulasi demi memastikan terpeliharanya dan keberlanjutan daya dukung lingkungan bagi masyarakat sekitar.

“Kendati perusahaan mengklaim bahwa AMDAL masih dalam proses, DPR melihat bahwa hal itu tidak bisa menjadi pembenaran atas tetap beroperasinya kegiatan terkait di perusahaan. Untuk itu, kami meminta agar segala bentuk perizinan yang belum diselesaikan, termasuk dokumen AMDALnya, bisa segera diselesaikan dan segala bentuk kegiatan di perusahaan yang berisiko melanggar aturan bisa segera dihentikan atau akan dihentikan paksa oleh pihak berwenang,” pungkasnya.



image istimewa



“Kami menduga sejak awal terdapat celah dalam prosedur keselamatan yang tidak diterapkan dengan baik. Dari sidak ini akhirnya terungkap bahwa kasus ledakan tersebut terjadi akibat perusahaan lalai dalam memeriksa kondisi performa mesin. Dalam keterangan lain, disebutkan ada SOP yang belum sepenuhnya dijalankan terkait mekanisme pendinginan tungku sebelum dibuk

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

Tagar 'Kabur Aja Dulu' Trending Aleg PKS Meity: Motivasi Generasi Muda Kian Berkembang, Ambil Positifnya!

Jakarta (20/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia menanggapi trending 'kabur aja dulu' di media sosial sebagai semangat anak muda yang meluap karena belum mendapat wadah dan perlu dikelola Pemerintah di masa mendatang.

"Ibarat air yang meluber karena wadahnya kecil. Semangat itu hanya perlu dikelola dan dikanalisis dengan baik oleh pemerintah. Jangan langsung bangun batas dengan generasi muda kita hanya karena soal tagar" jelasnya saat ditanya beberapa awak media soal tagar kabur aja dulu, Kamis (20/02).

Meity menerangkan lebih lanjut, apa yang dikhawatirkan oleh generasi muda di tren kabur aja dulu, juga sedang mengganggu pikiran pemerintah yang berkuasa saat ini.

"Sebab itu, dalam sejumlah kebijakannya, pemerintah berupaya keras menstimulasi terbukanya lapangan pekerjaan meski masih perlu dimaksimal-kan," ujar Anggota Komisi XIII ini.

"Pembukaan lapangan kerja di sektor industri, pertanian dan perkebunan. Satu-satu dibenahi," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Meity, telah menyiapkan rencana dan program perbaikan ekonomi agar dapat membuka lapangan pekerjaan lebih banyak di tahun-tahun mendatang.

"Jadi, mari kita dukung dan

berikan kesempatan bagi pemerintahan saat ini untuk berinovasi, dan terus memperbaiki yang kurang agar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan generasi mudanya," tambahnya.

Walaupun hanya bentuk kritik, namun bagi Meity, bila pun anak-anak muda benar-benar ingin pergi dan bekerja di luar negeri bukan masalah. Menurutnya, upaya itu justru menunjukkan besarnya motivasi generasi muda untuk berkembang dan maju.

"Mereka siap ke luar negeri, berarti mereka siap bersaing dengan bangsa lain di luar sana. Dengan demikian, kompetensi dan keterampilannya bisa lebih baik. Kerja di luar negeri bukan berarti tidak nasionalis," ungkapnya.

Namun sebagai Anggota Komisi XIII yang bermitra dengan imigrasi dan lembaga pemyarakatan, Meity berharap anak-anak muda tidak benar-benar kabur aja dulu.

"Kalau mau bekerja. Mesti menyiapkan diri, dari segi

Tagar 'Kabur Aja Dulu' Trending, Aleg PKS Meity: Motivasi Generasi Muda Kian Berkembang, Ambil Positifnya !

« SEBELUMNYA

keterampilan dan kapasitas bahasa, dan lainnya. Juga mempelajari baik budaya dan alur atau mekanisme bekerja di luar negeri," terangnya.

Meity khawatir, peluang ini juga dimanfaatkan oleh penyalur tenaga kerja 'nakal' yang memperdagangkan pekerja migran seperti yang dialami sejumlah warga negara Indonesia di Myanmar baru-baru ini.

"Tak masalah pergi atau kerja di luar negeri. Pekerja migran adalah pejuang devisa. Saya juga pengalaman tinggal di luar negeri. Biasanya, kalau di luar, rasa cinta terhadap

Indonesia makin dalam karena rindu. Tapi tetap hati-hati agar tidak tertipu modus penyalur tenaga kerja yang memperdagangkan orang," tutup Meity.

Sebelumnya media sosial diramaikan dengan cuitan 'Kabur aja dulu. Disini mah, kalau mau kerja dilihat pengalaman. Pengalaman udah banyak. Eh, dilihat umurnya,' kelakar aktor stand up comedy Yudha Keling di laman tiktok nya, meramalkan tagar kabur aja dulu'.

Sentilan itu dilanjutkan lagi seorang rekannya yang disambut tawa, 'Bisa sih gak dilihat umurnya. Tapi dilihat siapa pamannya. Haha...haha!'

Tak cukup itu, seorang

rekan Yudha Keling yang juga komika mempalpi, 'kabur aja dulu, di sini usaha penghasilannya masih dikit, di kepala ormasnya lansung banyak.'

'Jangankan orang usaha anak TK main drum band aja dipalak. Yudha Keling lanjut lagi. Kabur aja dulu, di sini mau kerja disuruh bikin SKCK. Tapi pejabatnya bekas tahanan KPK!'

Tagar kabur aja dulu tren di media sosial sepekan ini. Tagar ini populer terutama di kalangan anak-anak muda di platform tiktok, instagram dan facebook. Banyak menyebut, tagar ini sebagai bentuk kritik kalangan gen Z terhadap kondisi dalam negeri.

Seperti lapangan pekerjaan di Indonesia yang kian sempit, dan bentuk keresahan mereka terhadap fenomena penyimpangan politik dan ekonomi. Pula soal kebijakan pemerintah yang mereka tidak setuju.

Tak hanya komika seperti Yudha Keling, ribuan anak-anak muda pengguna platform juga menumpahkan keresahannya itu di platform. Termasuk mereka yang saat ini tengah menempuh pendidikan dan bekerja di luar negeri.

Tren-nya tagar ini mendapat perhatian publik Indonesia. Pejabat pemerintah sendiri, meresponnya dengan beragam pendapat. Dari pernyataan diplomatik hingga komentar bernada 'tinggi'.



"Tak masalah pergi atau kerja di luar negeri. Pekerja migran adalah pejuang devisa.

Saya juga pengalaman tinggal di luar negeri. Biasanya, kalau di luar, rasa cinta terhadap Indonesia makin dalam karena rindu. Tapi tetap hati-hati agar tidak tertipu modus penyalur tenaga kerja yang memperdagangkan orang,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI





image istimewa

Aleg PKS Sohibul Iman Dukung Peningkatan Inovasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Bangsa

Jakarta (19/02) — Anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS Muhammad Sohibul Iman menyoroti satu persoalan yang berkaitan dengan RUU Desain Industri, yang secara spesifik membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum yang membahas mengenai beberapa persoalan, salah satunya adalah mengenai hak kekayaan intelektual

Menurut Sohibul Iman, adanya undang-undang kekayaan intelektual memiliki dua tujuan,

yakni peningkatan iklim inovasi serta perlindungan bagi karya-karya kekayaan intelektual.

"Jadi dengan undang-undang ini, kita berharap iklim inovasi semakin meningkat, dan tentu memberikan perlindungan kepada karya-karya intelektual. Saya kira ini filosofi adanya undang-undang kekayaan intelektual," jelas pria yang akrab disapa MSI ini.

Sohibul Iman melanjutkan bahwa untuk dapat mencapai kedua tujuan tersebut, satu penyusunan undang-undang yang betul-betul bisa memberikan kemudahan masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual, yang di lain sisi juga perlu adanya penegasan dalam konteks perlindungananya.

Menurutnya, secara perundang-undangan oleh dunia internasional, namun Sohibul Iman menganggap bahwa adanya kontradiksi bagi kekayaan intelektual dalam negeri.

dengan undang-undang kita yang sudah comply dengan apa yang dituntut oleh internasional, ini menjadi undang-undang yang sangat kondusif untuk melindungi paten-paten internasional,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.

Anggota Komisi XIII DPR RI

"Nah ini menciptakan satu kontradiksi, jadi dengan undang-undang kita yang sudah comply dengan apa yang dituntut oleh internasional, ini menjadi undang-undang yang sangat kondusif untuk melindungi paten-paten internasional, karena paten kitanya masih (tergolong) sedikit. Kita membuat undang-undang ini sesuai standar internasional, ya justru supaya kita bisa melindungi hak intelektual dari karya-karya kita sendiri," jelasnya.

MSI kemudian memberikan satu contoh negara yakni Jepang yang menurutnya sangat baik dalam mengelola dan menerapkan persoalan terkait kekayaan intelektual.

"Jepang dianggap mampu menelaraskan antara peraturan yang sesuai standar internasional dengan iklim inovasi yang berkembang," tutup MSI.

SETUJUI RUU PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) FRAKSI PKS FOKUS PADA KEBERMANFAATAN

PKS TV DPR RI | F:FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fksdprri | @fraksipkdprri

1

TUJUAN UTAMA RUU MINERBA

MENINGKATKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

MEMASTIKAN KEDILIHAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MEMPERLUAS PARTISIPASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UNTUK BEBERAPA KELOMPOK.

PKS TV DPR RI | F:FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fksdprri | @fraksipkdprri

2

MENGAPA PENGELOLAAN TAMBANG MENJADI ISU PENTING?

Kontribusi sektor mineral dan batubara bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia cukup signifikan.

2,198 Triliun
10,5% dari Total PDB
(Data ESDM 2023)

PKS TV DPR RI | F:FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fksdprri | @fraksipkdprri

3

PENGELOLAAN TAMBANG UNTUK SIAPA?

Pemberian IUPK (izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk Badan Usaha milik Gomas Keagamaan

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tambang yang berorientasi sosial, moral, dan etika lingkungan serta kebermanfaatn bagi umat.

Kemirahan pengelolaan pertambangan bagi korporasi serta UKM

Meningkatkan kemampuan serta memperkuat riset dan inovasi bagi perguruan tinggi, utamanya yang memiliki program studi terkait pertambangan.

Kemirahan pengelolaan usaha pertambangan bagi korporasi serta UKM

Mendorong daya saing korporasi dan UKM, kemudahan akses finansial, serta mendorong peningkatan kapasitas bagi korporasi dan UKM.

PKS TV DPR RI | F:FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fksdprri | @fraksipkdprri

4

Perluasan kesempatan pengelolaan tambang dapat berdampak positif jika:

- Berlandaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan strategi pencegahan kerusakan lingkungan.
- Mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di sekitar wilayah tambang.
- Disertai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) serta komitmen berbasis komunitas.

PKS TV DPR RI | F:FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fksdprri | @fraksipkdprri

5

FPKS harap wujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan

Ini langkah yang sangat baik. Dengan aturan ini, kita memastikan sumber daya alam kita terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, baru sisanya bisa diekspor. Ini sesuai dengan semangat kemardian energi dan industri dalam negeri.

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

PKS TV DPR RI | F:FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fksdprri | @fraksipkdprri

Sampaikan Pandangan RUU KUHAP,

Fraksi PKS : Perlunya RUU KUHAP Bersinergi dengan Perkembangan Zaman

Jakarta (19/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui Anggota DPR RI Komisi III, Adang Daradjatun, menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai usul inisiatif dari DPR RI, pada rapat paripurna, Selasa, (18/02/2025).

Dalam pandangannya, FPKS menegaskan bahwa RUU KUHAP harus segera mengadopsi paradigma keadilan restoratif beserta pengaturan mekanismenya di setiap instansi penegak hukum.

Hal ini, kata Adang, bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait keadilan restoratif serta memastikan keselarasan dengan KUHP yang baru. "Selain itu, FPKS menekankan pentingnya RUU KUHAP sebagai rekodifikasi hukum acara pidana yang berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Prinsip ini harus disertai dengan mekanisme checks and balan-

ces serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana," ungkapnya.

Adang menambahkan, keseimbangan peran antara aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat, juga menjadi aspek krusial dalam revisi ini.

Lebih lanjut, FPKS menyoroti perlunya RUU KUHAP untuk mampu bersinergi dengan perkembangan zaman. Ini mencakup pengakuan terhadap alat bukti digital dan elektronik, penerapan persidangan daring, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah

akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan.

Dalam kesempatan lain, Adang Daradjatun yang akan menjadi bagian dalam pembuatan sebuah karya agung ini, menyampaikan "Kita harus sadar betul bahwa perkembangan teknologi yang pesat akan sangat mempengaruhi dunia hukum pidana. RUU KUHAP harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia".

Dengan pandangan tersebut, FPKS berharap RUU KUHAP dapat disempurnakan dan disahkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan serta menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.



FPKS menekankan pentingnya RUU KUHAP sebagai rekodifikasi hukum acara pidana yang berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Prinsip ini harus disertai dengan mekanisme checks and balances serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana,

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI



Fraksi PKS Minta Uni Eropa Gunakan Power-nya Untuk Mendukung Palestina Merdeka

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini bersama Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Raviendra Airlangga dan Bramantyo Suwondo mengadakan pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa (EU)

dan diterima secara bergantian oleh Wakil Ketua Parlemen Uni Eropa Martin Hojsik dan Ketua Komisi Luar Negeri dan Kerjasama Parlemen EU untuk ASEAN.

Jazuli Juwaini pada kesempatan tersebut menyampaikan agar EU menggunakan power-nya untuk menghentikan agresi dan pembantaian massal yang dilakukan kepada rakyat sipil Palestina serta ikut memuluskan perdamaian sampai Palestina merdeka.

Jazuli juga meminta agar Parlemen EU melawan keinginan Presiden AS Donald Trump untuk menjadikan Gaza seperti

barang dagangan (dengan rencana menguasai Gaza dan memindahkan warganya ke luar Gaza).

Anggota Komisi I DPR ini mengajak masyarakat dunia untuk melihat secara objektif dengan menggunakan rasa kemanusiaan apa yang terjadi di Gaza Palestina.

"Sudah satu tahun Israel membombardir Gaza dimana anak-anak, ibu-ibu, lansia dan masyarakat sipil Palestina yang tidak berdosa dibantai tiap hari, rumah-rumah mereka dihancurkan, tidak ada rumah sakit, obat-obatan dan tenaga

medis," jelasnya.

"Tentu yang memiliki rasa kemanusiaan tidak akan tega menyaksikan ini, maka kita harus bertindak dan tidak boleh diam mencari cara untuk menghentikannya," ungkapnya.

Sebagai Anggota Parlemen, lanjutnya, kita semua punya tanggung jawab bukan saja kepada rakyat kita tapi juga pada kemanusiaan global. Kami mengajak Anggota Parlemen UE untuk bersuara dan berbicara kepada dunia agar tragedi kemanusiaan ini segera dihentikan dan perdamaian dunia diwujudkan.

Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IFIP) ini juga mengapresiasi sikap beberapa Negara Eropa seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Slovenia, dan lainnya yang dengan tegas menentang kebiadaban Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Parlemen EU Martin Hojsik mengapresiasi kepedulian Parlemen Indonesia atas isu kemanusiaan di Gaza Palestina. Parlemen EU berkomitmen untuk terus mendukung kemanusiaan di Palestina yang dibuktikan dengan 40 persen bantuan kemanusiaan di Gaza berasal dari negara-negara Eropa.

Menurutnya, meskipun ada beragam sikap dan pandangan dari negara-negara EU (terhadap Palestina dan Israel) tapi dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia sikap EU



"Sudah satu tahun Israel membombardir Gaza dimana anak-anak, ibu-ibu, lansia dan masyarakat sipil Palestina yang tidak berdosa dibantai tiap hari, rumah-rumah mereka dihancurkan, tidak ada rumah sakit, obat-obatan dan tenaga medis,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

sama. Oleh karena itu, EU mendukung 'two state solution'

untuk menghentikan konflik agar tercipta perdamaian.



image istimewa

Setuju UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Fraksi PKS Harap Wujudkan Kesejahteraan Rakyat secara Berkeadilan

Jakarta (18/02) — Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Muh Haris mewakili Fraksi PKS DPR RI membacakan pendapat mini Fraksi terkait RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (17/02/2025).

Muh Haris mengatakan sebagai pelaksanaan penguasaan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di sektor pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam

Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

"Perubahan dan penyempurnaan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah mengalami beberapa kali pengujian di Mahkamah Konstitusi, dua diantaranya ditubuhkan bersyarat oleh Mahkamah

Konstitusi yaitu putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021," terang Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (final and binding), imbuhnya, harus segera ditindaklanjuti oleh DPR RI selaku pemegang kekuasaan pembentuk UU untuk memberikan kepastian hukum, kebermanfaatannya, dan keadilan.

"Fraksi PKS menilai bahwa perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibutuhkan dalam rangka menjawab tantangan-tantangan : Pertama, memperhatikan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan

Setuju UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Fraksi PKS Harap Wujudkan Kesejahteraan Rakyat secara Berkeadilan

« SEBELUMNYA

an rakyat secara berkeadilan; Kedua, untuk memperluas akses keterlibatan berbagai pihak pada kegiatan pertambangan yang berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional; serta ketiga, untuk memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan, efektif, dan efisien sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional," urai Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini

Fraksi PKS, kata Muh Haris, memberikan catatan-catatan berdasarkan masukan yang diberikan oleh masyarakat

"Keenam, Fraksi PKS menekankan agar pengaturan izin pertambangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal," pungkasnya.

dan pihak-pihak terkait.

"Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Pertama, Fraksi PKS menerima seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendasari penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memastikan penguasaan negara atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara dilakukan dengan pengelolaan

yang inklusif dan bertanggung jawab, mengutamakan evaluasi dan transparansi dalam perpanjangan izin pertambangan, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal, kesesuaian dengan tata ruang dan peraturan lainnya, serta perbaikan tata kelola sektor pertambangan di Indonesia, sebagaimana yang dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," jelasnya.

Selain itu, imbuhnya Muh Haris, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

"Kedua, Fraksi PKS memandang bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas bagi Badan Usaha milik Ormas Keagamaan merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas melalui partisipasi Ormas Keagamaan dalam sektor ekonomi," pungkasnya.

Ketiga, lanjut Haris, Fraksi PKS menilai peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi perguruan tinggi da-



pat meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam.

"Fraksi PKS juga merekomendasikan adanya insentif bagi perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi ekspansi ramah lingkungan. Fraksi PKS menilai bahwa kemitraan izin pertambangan dengan perguruan tinggi harus dilakukan dengan tetap mengedepankan sivitas akademika perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, inovatif, responsif, kreatif, terampil,

berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian," papar Wakil Walikota Salatiga 2016-2022 ini.

Keempat, lanjut Haris, Fraksi PKS menyambut baik dibukanya peluang bagi Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah dalam usaha pertambangan mineral dan batubara melalui pemberian prioritas.

"Fraksi PKS mendorong tersedianya fasilitas peningkatan kemampuan administratif/ manajemen, kemampuan

Setuju UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Fraksi PKS Harap Wujudkan Kesejahteraan Rakyat secara Berkeadilan

◀ SEBELUMNYA

teknis, pengelolaan lingkungan dan kemampuan finansial untuk memenuhi persyaratan pemberian IUP atau IUPK dalam rangka mendorong daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan dan opsi finansial lainnya bagi Koperasi, badan usaha kecil dan menengah," terangnya

Kelima, lanjutnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa pem-

berian izin usaha pertambangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus didasarkan pada kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rencana mitigasi dampak ekologis yang terukur.

"Keenam, Fraksi PKS menekankan agar pengaturan izin pertambangan dalam Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal," pungkasnya.

Ketujuh, ungkap Haris, Fraksi PKS menekankan agar pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini harus mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat adat.

"Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi PKS berharap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia serta pemerataan akses untuk mengelola tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Muh. Haris.



"Fraksi PKS mendorong tersedianya fasilitas peningkatan kemampuan administratif/ manajemen, kemampuan teknis, pengelolaan lingkungan dan kemampuan finansial untuk memenuhi persyaratan pemberian IUP atau IUPK dalam rangka mendorong daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan dan opsi finansial lainnya bagi Koperasi, badan usaha kecil dan menengah,

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Bahagia Menyambut
RAMADHANA
KAREEM 1446 H

*Ayo Saling
Berbagi &
Peduli*





Sampaikan Duka atas Banjir di Majalengka, Ateng Sutisna Minta Otoritas Beri Atensi Serius

Majalengka (11/02) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Subang, Majalengka, Sumedang), Ateng Sutisna, menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas musibah banjir dan longsor yang melanda empat kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu (09/02/2025) petang hingga malam menyebabkan bencana di Kecamatan Sindangwangi, Rajagaluh, Leuwimunding, dan Sukahaji.

"Saya turut berduka atas bencana yang terjadi di Majalengka. Saya berharap seluruh warga yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Ateng.

Banjir yang terjadi mengakibatkan puluhan rumah warga terendam, akses jalan rusak, serta sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan. Bahkan, longsor di beberapa titik juga merusak kandang ternak dan mengancam infrastruktur jembatan.

Ateng menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Ia mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta Pemerintah

Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi bencana.

"Kita tidak boleh lengah. Saya minta BPBD, Pemkab, dan Pemprov untuk terus bergerak dan memberi atensi serius terhadap kasus ini. Penanganan yang mendesak seperti evakuasi korban, perbaikan infrastruktur, maupun upaya jangka panjang untuk mencegah bencana serupa perlu dilakukan," tegasnya.

"Kita tidak boleh lengah. Saya minta BPBD, Pemkab, dan Pemprov untuk terus bergerak dan memberi atensi serius terhadap kasus ini. Penanganan yang mendesak seperti evakuasi korban, perbaikan infrastruktur, maupun upaya jangka panjang untuk mencegah bencana serupa perlu dilakukan,"

Ateng juga mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola drainase serta peningkatan infrastruktur pengendali banjir di daerah rawan.

"Bencana ini mengajarkan kita bahwa sistem drainase dan pengelolaan sungai harus ditingkatkan. Kita tidak bisa menunggu kejadian lebih parah baru bertindak," tambahnya.

Di samping itu, Ateng juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari ke depan.

"Saya mengajak semua pihak, baik pemerintah, relawan, maupun masyarakat, untuk bersatu menghadapi dan menangani bencana ini. Mari kita saling membantu agar saudara-saudara yang terdampak bisa segera bangkit," tutupnya.



image istimewa

Komisi VII FPKS Izzuddin Al-Qassam : Efisiensi Anggaran Jangan Disalahartikan Jadi PHK

Jakarta (12/02) --- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Ruang Komisi VII DPR RI, I Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah tidak boleh disalahartikan sebagai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas video viral yang beredar, yang dianggap menimbulkan kerancuan informasi di masyarakat.

Dalam kunjungan kerja reses ke Radio Republik Indonesia (RRI) di Kota Ternate, berbagai aspirasi disampaikan terkait peralatan yang sudah usang, keterbatasan dana SPPD, serta kendala operasional yang timbul karena kondisi geografis antar pulau.

Al-Qassam menjelaskan bahwa kendati terdapat tantangan tersebut, program efisiensi anggaran yang sedang berjalan merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, bukan sebagai indikasi pengurangan pegawai atau PHK.

"Efisiensi yang sedang diterapkan adalah upaya penyesuaian dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja," tegas Al-

Qassam.

Al-Qassam juga mengklarifikasi bahwa video viral yang sudah beredar itu menjadi bahan koreksi bersama agar antara perlu ada komunikasi yang baik kepada seluruh pihak yang terlibat agar hal ini tidak menjadi narasi yang kontra produktif terhadap sasaran kerja yang ingin dicapai pemerintah dan harapan besar masyarakat terhadap program tersebut.

Al-Qassam menyatakan harapan agar seluruh elemen yang terlibat dalam penyiaran RRI dapat merasakan dampak positif di masa mendatang.

"Kami mengapresiasi inisiatif RRI yang telah berkomunikasi secara terbuka dan bekerja sama hingga bulan April. Kami juga menantikan keputusan dari direksi dan dewan direksi agar tidak ada pegawai yang terdampak pemutusan hubungan kerja, karena hal tersebut merupakan prioritas utama,"

Komisi VII FPKS Izzuddin Al-Qassam: Efisiensi Anggaran Jangan Disalahartikan Jadi PHK

« SEBELUMNYA

tambah Al-Qassam.

Al-Qassam tetap mengapresiasi kerja RRI, TVRI dan LKBN ANTARA yang ditengah keterbatasan anggaran dan program masih memiliki militansi yang kuat untuk menjadi duta informasi ke seluruh pelosok Indonesia.

Penting dilakukan sinergi dan komunikasi antara lembaga penyiaran seperti RRI, TVRI dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

Al-Qassam berharap, melalui kerja sama dan dialog yang konstruktif, seluruh pihak dapat melewati masa penyesuaian ini tanpa mengorbankan kesejahteraan para pelaku penyiaran nasional.

“Kami mengharapkan agar kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak disalahartikan sebagai PHK, karena menjaga kesejahteraan pegawai dan keberlangsungan layanan penyiaran nasional merupakan prioritas utama,” pungkask Al-Qassam.



image istimewa



“Kami mengapresiasi inisiatif RRI yang telah berkomunikasi secara terbuka dan bekerja sama hingga bulan April. Kami juga menantikan keputusan dari direksi dan dewan direksi agar tidak ada pegawai yang terdampak pemutusan hubungan kerja, karena hal tersebut merupakan prioritas utama,”

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara

Hadiri Temu Lapang di Waimital, Saadiah Uluputty Serap Aspirasi Petani dan Panen Padi Unggul

Seram Bagian Barat (11/02) -- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menghadiri kegiatan Temu Lapangan di Desa Waimital, Seram Bagian Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku, Perum Bulog Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Dandim SBB, Kepala Desa Waimital, serta puluhan petani dari Desa Waimital dan Waehatu.

Dalam acara yang diikuti oleh 100 peserta ini, para petani berkesempatan untuk memanen langsung varietas padi unggul Inpari 16 dan Sintanur, yang dikembangkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di wilayah Maluku.

"Pertemuan ini menjadi ajang diskusi langsung antara petani dengan para pemangku

kebijakan untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kendala dan kebutuhan dalam sektor pertanian," tutur Politisi PKS ini.

Saadiah Uluputty dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pertanian harus mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam ketersediaan sarana produksi, akses pasar, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada petani.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas, mengingat pertanian merupakan sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat di daerah ini.

"Kami di Komisi IV DPR RI terus berupaya mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dalam hal

subsidi pupuk, pengembangan bibit unggul, serta akses pasar yang lebih luas bagi hasil panen mereka," ujar Saadiah Uluputty.

Selain panen padi unggul, Anggota DPR Dapil Maluku ini menerangkan bahwa, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi petani untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti ketersediaan pupuk, teknologi pertanian, serta infrastruktur pendukung pertanian di wilayah mereka.

Aspirasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik bagi sektor pertanian di Maluku.

Anggota DPR Kartini PKS ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai lembaga pertanian dalam meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani.

"Kolaborasi antara petani dan pemerintah harus terus diperkuat agar sektor pertanian di Maluku semakin maju dan berdaya saing. Dengan adanya kegiatan Temu Lapangan ini, Saya berharap petani di Desa Waimital dan sekitarnya mendapatkan solusi konkret untuk permasalahan yang mereka hadapi, serta terus termotivasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerahnya", tutup Saadiah Uluputty.



"Kami di Komisi IV DPR RI terus berupaya mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dalam hal subsidi pupuk, pengembangan bibit unggul, serta akses pasar yang lebih luas bagi hasil panen mereka

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



Nevi Zuairina Dukung Pengkaderan Guru Amal Usaha Muhammadiyah di Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota (13/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan Baitul Arqam yang akan diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lima Puluh Kota pada pertengahan Februari 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan ideologi keislaman dan kepemimpinan bagi para guru di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

Dalam pernyataannya, Nevi menegaskan bahwa penguatan kaderisasi di Muhammadiyah sangat penting untuk memperkokoh pemahaman keislaman, memperkuat integritas, serta meningkatkan kompetensi kepemimpinan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.

"Kegiatan Baitul Arqam ini merupakan bentuk nyata dari usaha Muhammadiyah dalam membangun generasi yang memiliki wawasan keislaman yang kuat dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guru-guru di Amal Usaha Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, sehingga perlu mendapatkan pembinaan secara berkala," ungkap politisi PKS ini.

Baitul Arqam sendiri merupakan program kaderisasi khas Muhammadiyah yang ber-

tujuan menciptakan kesatuan sikap, wawasan, dan cara berpikir dalam menjalankan misi Muhammadiyah.

Melalui kegiatan ini, Nevi berharap para peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang Islam dalam perspektif Muhammadiyah, termasuk prinsip-prinsip ibadah yang benar serta peran dakwah dan tajdid dalam membangun masyarakat Islam yang sebenarnya.

Anggota DPR Komisi XII ini juga menekankan bahwa program kaderisasi semacam ini memiliki dampak luas dalam memperkuat nilai-nilai keislaman

dan di tengah masyarakat.

Ia berharap agar para peserta Baitul Arqam dapat menjadi agen perubahan yang menggerakkan pendidikan Islam yang berkualitas dan berkemajuan di Sumatera Barat.

"Sebagai bagian dari masyarakat, saya berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para peserta tentang Islam dan Muhammadiyah, tetapi juga menguatkan tekad mereka untuk berkontribusi lebih besar dalam membangun bangsa melalui jalur pendidikan," tambahnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah, diharapkan program kaderisasi ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan dan menghasilkan generasi pendidik yang berkompeten, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam berkemajuan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah, diharapkan program kaderisasi ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan dan menghasilkan generasi pendidik yang berkompeten,

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Kolaborasi Kepala Desa, Aleg PKS Provinsi dan Kota di Bekasi, Haji Jalal Dukung Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

image istimewa

Bekasi (13/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugiarti dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Ade Jernah Fajarwati berkolaborasi dengan Kepala Desa Sukaraya

meluncurkan program pemberdayaan ikan nila di Perum Nirwana Regency (PNR), Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Program pemberdayaan ikan nila ini berlangsung di Blok P, RT 001/RW 009, Dusun 1, Perum Puri Nirwana Residences, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian pangan berbasis lokal.

"Melalui program ini, kami ingin memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya melalui budidaya ikan nila yang bernilai

ekonomi tinggi," ujar pria yang akrab disapa Haji Jalal.

Haji Jalal berharap program ini menjadi model kolaborasi yang sukses antara legislatif, pemerintah desa, dan masyarakat.

"Kami ingin program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk menciptakan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Desa Sukaraya mengapresiasi inisiatif ini dan berharap program serupa dapat terus berlanjut.

"Program ini sangat membantu masyarakat kami dalam meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," katanya.

"Program ini sangat membantu masyarakat kami dalam meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,

H. JALAL ABDUL NASIR, AK.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII



Gelar Senam Sehat dan Berbagi Sembako di Solo,

Abdul Kharis Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh

Solo (17/02) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menggelar kegiatan senam sehat di Lapangan Totosari, Solo.

Acara ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang antusias mengikuti kegiatan olahraga bersama.

Senam sehat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebugaran tubuh.

Dengan dipandu oleh instruktur profesional, peserta dengan semangat mengikuti rangkaian gerakan senam yang dirancang untuk menjaga kebugaran fisik. Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi dan mempererat kebersamaan antarwarga.

Selain senam, Abdul Kharis Almasyhari juga membagikan sembako berupa beras, minyak goreng, cabai,

telur, dan ayam potong kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial serta untuk meringankan beban ekonomi warga.

Dalam sambutannya, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi atas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini.

“Saya sangat senang melihat antusiasme masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan ini. Semoga senam sehat ini memberikan manfaat dan semakin mempererat kebersamaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga yang berharap agar acara serupa dapat terus diadakan di masa mendatang.

“Saya sangat senang melihat antusiasme masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan ini. Semoga senam sehat ini memberikan manfaat dan semakin mempererat kebersamaan di tengah masyarakat,”

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



Gelar Sosialisasi Program JKN-KIS di Kalbar,

Alifudin: Bentuk Perhatian Pemerintah pada Kondisi Kesehatan Masyarakat

Pontianak (18/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menyelenggarakan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bersama BPJS Kesehatan untuk masyarakat di Dapil Kalimantan Barat I.

Acara yang diadakan di beberapa titik di Kota Pontianak ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi peserta program JKN-KIS dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah.

Alifudin menyampaikan bahwa program JKN-KIS adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

“Sebagai Wakil Rakyat, saya sangat mengapresiasi adanya program JKN-KIS yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menjadi peserta, kita tidak hanya mendapatkan manfaat pengobatan ketika sakit, tetapi juga dapat melakukan upaya preventif agar tetap sehat,” ung-kap Alifudin.

Alifudin juga mengajak masyarakat untuk segera menjadi peserta aktif JKN-KIS apabila belum terdaftar. Alifudin turut menyampaikan betapa pentingnya manfaat peserta

JKN-KIS.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang belum menjadi peserta, untuk segera mendaftar dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan yang sudah disediakan.

Program ini sangat membantu dalam situasi darurat maupun saat melakukan pemeriksaan rutin,” tegasnya.

Alifudin turut memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberjalanan program cek kesehatan gratis saat ulang tahun yang dilaksanakan di berbagai wilayah. Program ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, yang bertujuan untuk deteksi dini penyakit dan menjaga kesehatan secara menyeluruh.

“Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap kesehatan masyarakat, saya mendukung penuh program cek kesehatan gratis ini. Ini adalah kesempatan emas bagi warga untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka dan melakukan

Gelar Sosialisasi Program JKN-KIS di Kalbar, Alifudin : Bentuk Perhatian Pemerintah pada Kondisi Kesehatan Masyarakat

« SEBELUMNYA

tindakan preventif jika ditemukan gejala penyakit,” ujarnya .

Alifudin menambahkan bahwa pelayanan cek kesehatan gratis ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan aktif.

“Saya harap masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini dengan baik, karena deteksi dini adalah kunci dalam mencegah berbagai penyakit serius. Jangan tunggu sampai sakit, lebih baik periksa kesehatan

secara rutin,” ajaknya.

Sebagai penutup, Alifudin mengingatkan masyarakat agar terus mendukung keberlanjutan program-program kesehatan seperti JKN-KIS dan cek kesehatan gratis.

“Dengan ikut serta dalam program ini, kita turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Mari bersama-sama jaga kesehatan kita dan keluarga dengan menjadi peserta JKN-KIS serta memanfaatkan fasilitas dan program JKN-KIS yang ada,” tutup Alifudin.



“Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap kesehatan masyarakat, saya mendukung penuh program cek kesehatan gratis ini. Ini adalah kesempatan emas bagi warga untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka dan melakukan tindakan preventif jika ditemukan gejala penyakit,”

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Komisi IX DPR RI



Saadiah Uluputty Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Petani Lokal di Desa Waipirit

Waipirit (18/02) --- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan mendengarkan langsung aspirasi petani lokal di Desa Waipirit, Seram Barat.

Dalam kunjungannya, Saadiah disambut oleh Kepala Desa Waipirit yang ingin menyampaikan kebutuhan petani di daerah tersebut yang berlangsung pada pertengahan februari 2025, termasuk dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas pertanian lokal.

Kepala Desa Waipirit menegaskan bahwa masyarakat lokal yang bukan bagian dari program transmigrasi juga memiliki potensi besar dalam sektor pertanian.

"Lahan sawah yang mereka kelola mampu menghasilkan panen dengan produktivitas yang cukup tinggi, mencapai 5 hingga 6 ton per hektar dalam kondisi ideal. Namun, tantangan utama yang mereka hadapi saat ini adalah kurangnya

dukungan alsintan, terutama Combine Harvester untuk mempercepat proses panen dan pascapanen," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Saadiah Uluputty dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan permintaan para petani di Desa Waipirit.

"Saya melihat sendiri bahwa pertanian di sini bukan hanya berkembang di kawasan transmigrasi, tetapi juga di kalangan masyarakat lokal. Mereka memiliki potensi besar, hanya saja perlu dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik. Oleh karena itu, saya siap memperjuangkan pengadaan alsintan, termasuk Combine Harvester, agar produktivitas pertanian di Waipirit semakin meningkat," ujar politisi PKS ini.

Lebih lanjut, Legislator perempuan dari Indonesia Timur ini menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian di Maluku sejalan dengan visi nasional untuk mencapai swasembada pangan.

"Kita bersama-sama mendukung Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Selain itu, saya juga mendorong agar Maluku dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan daerah, yang nantinya akan menopang ketahanan nasional dan keamanan pangan untuk masa depan," tambahnya.

Anggota FPKS DPR RI ini juga berharap agar pemerintah daerah turut serta dalam mempercepat realisasi bantuan alsintan bagi para petani.

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Kita tidak boleh membiarkan petani berjuang sendirian. Dengan dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai, saya yakin sektor pertanian di Maluku, khususnya di Waipirit, akan semakin berkembang."



Saya mendorong agar Maluku dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan daerah, yang nantinya akan menopang ketahanan nasional dan keamanan pangan untuk masa depan,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

tutup Saadiah Uluputty.

Dengan kunjungan ini, harapan besar muncul bagi petani lokal di Waipirit untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pengembangan sektor

pertanian. Langkah konkret dari Saadiah Uluputty diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang selama ini mereka hadapi.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



Salurkan
Aspirasi
Anda

Program Hari
ASPIRASI
Fraksi PKS DPR RI



Form Aspirasi
<https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



Berita Hari Aspirasi
<https://fraksi.pks.id/rubrik/berita/aspirasi/>



Tindak Lanjut Aspirasi
<https://fraksi.pks.id/rubrik/tindak-lanjut-aspirasi/>

Terima Kunjungan Siswa
SMA IT Bunayya,

Junaidi Auly Ajak Siswa Berkontribusi bagi Kemajuan Bangsa

Jakarta (18/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menerima kunjungan dari siswa-siswi SMA IT Bunayya, Tangerang di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (18/02).

Kunjungan kali ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMA IT Bunayya terkait peran DPR dalam dinamika pembangunan bangsa dan negara.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan kami di sela-sela kesibukan para Anggota Dewan. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi dan pemahaman siswa-siswi kami terkait isu sospol dan juga peran DPR dalam dinamika pembangunan bangsa" ujar Hasan selaku Kepala Sekolah SMA IT Bunayya.

Kunjungan kali ini, menurut Junaidi merupakan salah satu langkah yang baik, terutama agar masyarakat dan Anggota DPR RI mampu menjalin kolaborasi yang baik.

"Kami membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke fraksi. Kolaborasi masyarakat dan Anggota DPR RI sudah menjadi sebuah keharusan. Terkadang di beberapa tempat, seringkali masyarakat ingin menyampaikan aspirasi tapi tidak tahu menyampaikannya kemana" ujar Junaidi dalam sambutannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari siswa-siswi SMA IT Bunayya dengan Anggota DPR Junaidi Auly. Para siswa berdiskusi berbagai hal mulai dari tugas dan fungsi DPR, sikap Fraksi PKS, hingga bagaimana agar pemuda bisa berkontribusi bagi negara.

"Para pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus bisa berkontribusi dalam banyak hal tergantung apa yang mampu diberikan, termasuk dari hal kecil terlebih dahulu. Anak-anak diharapkan dapat belajar dengan baik untuk menjadi generasi unggul yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi untuk meneruskan perjuangan meraih cita-cita bangsa dan negara." pungkas Junaidi.

Kunjungan ditutup dengan pemberian cinderamata dan sesi foto bersama antara Junaidi Auly dengan rombongan siswa-siswi dan guru SMA IT Bunayya.



"Para pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus bisa berkontribusi dalam banyak hal tergantung apa yang mampu diberikan, termasuk dari hal kecil terlebih dahulu. Anak-anak diharapkan dapat belajar dengan baik untuk menjadi generasi unggul yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi untuk meneruskan perjuangan meraih cita-cita bangsa dan negara."

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

Beri Edukasi bagi Pelajar,

Fraksi PKS DPR RI Terima Kunjungan Siswa SMPIT Insan Cita Serang

Jakarta, (18/02) – Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan dari SMPIT Insan Cita Serang di Kompleks Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (18/02). Rombongan disambut langsung oleh Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ibu Vaolin.

Ustadz Azis selaku koordinator rombongan menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memberikan motivasi serta menambah wawasan, pengalaman, dan keberanian bagi para siswasiswi SMPIT Insan Cita Serang. “Kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang hangat ini. Semoga kunjungan ini menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak kami,” ujar Ustadz Azis.

Fraksi PKS DPR RI menyambut baik kehadiran rombongan dan menjelaskan peran DPR sebagai lembaga legislatif yang

memiliki tiga fungsi utama, yakni membuat undang-undang, menyusun anggaran, serta mengawasi kinerja pemerintah.

“DPR adalah rumah rakyat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk diperjuangkan oleh para anggota dewan,” jelas Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI, Ibu Vaolin.

Dalam sesi diskusi, para siswa menyampaikan berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai bagaimana aspirasi masyarakat dapat masuk ke dalam penyusunan undang-undang. Menanggapi hal ini,

Tenaga Ahli Fraksi menjelaskan bahwa usulan dari masyarakat dapat masuk melalui fraksi dan kemudian dikomunikasikan antarfraksi untuk dipertimbangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Kami selalu berusaha menampung suara rakyat agar bisa menjadi bagian dari kebijakan yang lebih besar,” tambahnya.

Selain itu, para siswa juga mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja serta fokus pemerintah terhadap dunia pendidikan. Tenaga Ahli Fraksi kemudian menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan kawasan industri, wisata, dan program UMKM, meskipun diakui bahwa hal ini masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

“Lapangan pekerjaan menjadi salah satu perhatian utama kami, dan setiap program pemerintah diusahakan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Kunjungan ini menjadi momen berharga bagi para siswa untuk memahami lebih dalam tentang proses legislasi dan peran DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, pemberian cinderamata, serta rombongan melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Museum DPR RI.



“DPR adalah rumah rakyat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk diperjuangkan oleh para anggota dewan,”

VOULIN

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI





Terima Kunjungan DPD PKS Kabupaten Garut, Sohibul Iman Ajak Semua Pihak Sinergi Maksimal Program Pemerintah

Jakarta (12/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Sohibul Iman menerima kunjungan dan silaturahmi struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Garut di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, (12/02/2025).

Ketua DPD PKS Kabupaten Garut Helmi mengaku tujuan kedatangannya untuk bersilaturahmi dan membangun sinergi dengan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Sementara itu Anggota Komisi XIII yang akrab disapa MSI mengaku bahagia bisa dikunjungi oleh pimpinan dan struktur DPD PKS Kabupaten Garut.

"Saya mengapresiasi semua usulan dan aspirasi yang disampaikan serta akan berupaya melakukan kordinasi serta sinergitas dengan Anggota Fraksi

PKS yang lainnya," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat XI ini.

MSI mengaku perlu adanya sinergitas antar Aleg Daerah, Provinsi dan Pusat agar aspirasi masyarakat yang beragam bisa dimaksimalkan dengan program pemerintah.

"Aspirasi soal pemberdayaan masyarakat akan dikomunikasikan dengan anggota komisi terkait. Dan segmen UMKM sangat potensial untuk dijadikan objek pemberdayaan masyarakat," tutup mantan Presiden PKS ini.

"Aspirasi soal pemberdayaan masyarakat akan dikomunikasikan dengan anggota komisi terkait. Dan segmen UMKM sangat potensial untuk dijadikan objek pemberdayaan masyarakat,"

**MOHAMAD SOHIBUL
IMAN, M.Eng., Ph.D.**

Anggota Komisi XIII DPR RI



image istimewa

Serap Aspirasi DPC PKS Sukadiri, Habib Idrus Berkomitmen Perjuangkan Hak Nelayan

Jakarta (12/02) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri bersama Rahmat Saleh menerima aspirasi dari DPC PKS Sukadiri Tangerang Banten di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI, Lantai 3 Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2025).

Ketua DPC PKS Sukadiri Fauzi menyampaikan maksud kedatangannya untuk silaturahmi dan menyampaikan permasalahan soal proyek PIK 2.

Fauzi mengatakan dampak bagi nelayan dengan adanya proyek tersebut adalah jarak mereka menjadi lebih jauh karena harus memutar pagar laut ditambah lagi pendapatan nelayan jadi menurun karena ikan berkurang.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Dapil Tangerang Raya Habib Idrus mengatakan pihaknya sudah menyampaikan keluhan nelayan bahkan hingga turun di wilayah PSN PIK 2 ini.

"Issue paling penting

adalah yang berkaitan dengan HGB laut yang menyalahi aturan hukum dan perundang-undangan. Intinya kami perlu input data dari lapangan sebagai kondisi objektif di lapangan," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Habib Idrus menegaskan pihaknya sudah mendesak kementerian ATR BPN untuk mecabut sertifikat wilayah laut dan membenahi masalah pertahanan di wilayah PIK 2.

"Semua PSN akan dievaluasi dan kami gabungan Anggota DPR dari dapil Banten III akan melakukan advokasi terkait masalah PIK 2," ujarnya.

"Issue paling penting adalah yang berkaitan dengan HGB laut yang menyalahi aturan hukum dan perundang-undangan. Intinya kami perlu input data dari lapangan sebagai kondisi objektif di lapangan,"

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi I DPR RI



Terima Aspirasi KPPU, Rizal Bawazier akan Bawa Usulan Perubahan Ketiga RUU no. 5 tahun 1999 ke Komisi VI

Jakarta (11/02) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rizal Bawazier menerima aspirasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI, Lantai 3, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (11/02/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa membahas perubahan ketiga atas Undang Undang no. 5 tahun 1999.

"Silaturahmi ke Fraksi PKS untuk menyampaikan aspirasi dan juga mendorong Usulan Perubahan Ketiga RUU no. 5 tahun 1999," ungkapnya.

Hal substantif mendasar, kata Fanshurullah, yakni ekstrateritorial, pasar bersangkutan, pre merger notifikasi, penyalahgunaan posisi tawaran dominan

"Hal substantif lain yang ingin dimasukkan : a. tentang kelembagaan KPPU, b. kewenangan upaya paksa, c. eksekusi

putusan, d. program lisensi, e. penerapan lisensi HKI agar tidak bertentangan dengan persaingan sehat, f. alat bukti dalam penanganan perkara," paparnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi VI, Rizal Bawazier menegaskan akan membawa usulan RUU ke komisi VI. Untuk itu, imbuh Rizal, KPPU sebagai mitra komisi VI perlu menyamakan persepsi terkait RUU perubahan ini.

"Yang harus dipikirkan ke depan adalah bagaimana agar KPPU ini mendapatkan PNBP di depan," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah X ini.

KPPU sebagai mitra komisi VI perlu menyamakan persepsi terkait RUU perubahan ini. Yang harus dipikirkan ke depan adalah bagaimana agar KPPU ini mendapatkan PNBP di depan,"

RIZAL BAWAZIER

Anggota Komisi VI DPR RI



Terima Kunjungan DPD PKS Pringsewu, Almuzzammil Yusuf: Jadikan Amanah Sarana Berkhidmat pada Ummat

Jakarta (12/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah dan Almuzzammil Yusuf menerima kunjungan dari struktur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Pringsewu Lampung di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, (12/02/2025).

Ketua DPD PKS Pringsewu Zuni-anto dalam sambutan pembukanya mengaku bersyukur bisa hadir berstrukturahmi di Fraksi PKS DPR RI.

"Bersama kami Bupati terpilih kabupaten Pringsewu Bapak Riyanto Pamungkas dari PKS. Kami berharap bisa bersinergi dan memberikan dukungan untuk mengisi pembangunan Pringsewu dibawah kepemimpinan kader PKS," ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifah Amalia menyampaikan peran kepala daerah sangat strategis untuk mengoptimalkan kinerja khidmah dakwah kita kepada masyarakat

"Peran Lembaga-lembaga dakwah dan sosial pendidikan menjadi sangat penting sebagai wadah untuk turunnya program yang diluncurkan untuk masyarakat," ujar Anggota Komisi X DPR RI ini.

Disaat yang bersamaan, Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I, Almuzzammil Yusuf

mengingatkan pejabat daerah terutama Bupati dan Walikota untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan.

"Pak Bupati harus melangkah dengan hati-hati baik dalam pelayanan langsung maupun tidak langsung. Terutama dalam penggunaan anggaran. Prioritaskan kebijakan kepada masyarakat yang lapar untuk diperhatikan dan dilayani," terang Muzzammil.

Muzzammil juga memberikan saran agar Bupati menjadi negarawan saat menjabat, karena merupakan kunci kemandirian dakwah dalam lingkaran kekuasaan.

"Rangkul semua elemen masyarakat dan pejabat

"Rangkul semua elemen masyarakat dan pejabat pemerintah dalam dekapan dakwah kita. Kuatkan dakwah kultural dan struktural untuk memperkuat pak Bupati kita,

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

pemerintah dalam dekapan dakwah kita. Kuatkan dakwah kultural dan struktural untuk memperkuat pak Bupati kita," ujarnya.

Sementara Bupati terpilih Pringsewu Riyanto Pamungkas dalam sambutannya menyampaikan bahwa amanah yang diembannya sangat berat.

"Amanah ini bagi saya berat sekali, tapi saya yakin bisa menjalankan amanah ini selama disuport dan didampingi oleh para pimpinan PKS dari Daerah sampai DPP. Saya akan membuat standar tinggi dalam membangun Pringsewu sebagai model kepemimpinan PKS," tandasnya.

Riyanto bertekad untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan program pembangunan yang terbaik yang bisa dilakukan.

"Mohon bantuan dan bimbingan dari semuanya selama saya memimpin Pringsewu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini," tutup Riyanto.



image istimewa

Fraksi PKS Terima Kunjungan Forum Yayasan Serang Timur; Bahas Isu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Jakarta (19/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan dari Forum Yayasan Serang Timur di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta (19/02).

Rombongan diterima oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati, dan Anggota Komisi X M. Iqbal Romzi.

Kunjungan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi

“Orang paling mulia adalah orang yang mengelola pendidikan, karena pahalanya tidak akan pernah putus. Oleh karena itu, kami di Fraksi PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat,”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

terkait berbagai isu pendidikan, khususnya mengenai Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru sekolah swasta, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyambut baik audiensi ini dan menegaskan pentingnya peran para pendidik dalam mencerdaskan bangsa.

“Orang paling mulia adalah orang yang mengelola pendidikan, karena pahalanya tidak akan pernah putus. Oleh karena itu, kami di Fraksi PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat,” ujar Jazuli.

Dalam diskusi, perwakilan

Forum Yayasan Serang Timur menyoroti keterbatasan akses sekolah swasta terhadap beasiswa PIP dan KIP-K.

Perwakilan forum menyampaikan bahwa kuota PIP lebih banyak diberikan kepada sekolah negeri, sementara sekolah swasta masih mengalami kesulitan dalam mengaksesnya.

Menanggapi hal ini, Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal akses beasiswa agar lebih merata.

“Kami akan menyempurnakan sistem agar akses PIP dan KIP-K bisa lebih luas, khususnya bagi sekolah swasta yang selama ini sering terpinggirkan,” kata Kurniasih.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***